



LAKIP 2013

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PEMERINTAH KOTA TERNATE

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Ternate tahun 2013, disusun berpedoman pada Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2013. Penetapan Kinerja tersebut disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Ternate tahun 2011-2015, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2013 dan Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kota Ternate tahun 2013. LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2013, dibuat untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagaimana yang diwajibkan pada Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Kinerja Pemerintah Kota Ternate yang diukur dan dievaluasi dalam LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 adalah indikator kinerja sasaran sesuai dengan penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013. Indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 memberikan kontribusi langsung pada pencapaian sasaran Pemerintah Kota Ternate tahun 2013.

Hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, menunjukkan bahwa Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari hasil pengukuran penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013, sebanyak 11 sasaran semuanya mencapai hasil optimal $\geq 85\%$. Capaian kinerja sasaran strategis tahun 2013 secara garis besar adalah sebagai berikut:

| NO | SASARAN | CAPAIAN |
|----|--|---------|
| 1 | Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan | 100,70% |

| | | |
|------------------|--|---------|
| 2 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik | 105,39% |
| 3 | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 190,61% |
| 4 | Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat | 232,17% |
| 5 | Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu | 97,51% |
| 6 | Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat | 118,01% |
| 7 | Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional. | 99,36% |
| 8 | Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas | 101,25% |
| 9 | Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir | 94,97% |
| 10 | Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya | 122,06% |
| 11 | Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah | 97,78% |
| JUMLAH RATA-RATA | | 123,61% |

11 (sebelas) sasaran strategis tersebut di atas, mempunyai indikator kinerja sasaran sebanyak 91 indikator. Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran tahun 2013 sebesar 123,61%, kinerja pencapaian indikator sasaran tahun 2012 sebesar 99,25%, dengan demikian terjadi peningkatan kinerja pencapaian indikator sasaran tahun 2013 sebesar 24,36 %.

Jumlah indikator kinerja sasaran tahun 2013 sebanyak 91 indikator, 80 (87,91%) indikator kinerja sasaran mencapai hasil optimal ($\geq 85\%$), dan hanya 11 (12,09%) indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate tahun

2013 yang nilai capaiannya kurang optimal (< 85%). Capaian indikator sasaran yang kurang/tidak optimal tersebut, yaitu:

1. Angka kesembuhan penderita TB paru dan BTA, nilai capaian 62,82%. Rendahnya nilai capaian disebabkan adanya kasus di RS Chasan Boesorie yang tidak dilakukan pemeriksaan dahak di akhir pengobatan dan angka kematian masih tinggi dikarenakan adanya penyakit penyerta seperti Diabetes Melitus, Jantung, dll.
2. Persentase gizi buruk pada balita nilai capaian 57,14%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan masih tingginya kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan. Pada tahun 2013 prevalensi gizi buruk 0,7%, yaitu dari 8.848 anak yang ditangani, ditemukan 60 kasus gizi buruk yang ditemukan. Tingginya kasus gizi buruk tersebut disebabkan:
 - a. Kegiatan Promotif belum berjalan dengan maksimal (pemantauan pertumbuhan, konseling ASI /MP-ASI).
 - b. Adanya penyakit penyerta (TB, Pnemonia, Malaria).
 - c. Faktor Ekonomi (masi kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga).
3. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk, nilai capaian 59,09%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan jumlah dokter gigi yang melayani kesehatan gigi di Kota Ternate jumlahnya masih minim, yaitu jumlah dokter gigi yang ada di Kota Ternate hanya berjumlah 13 orang, kondisi ideal seharusnya 22 orang dokter.
4. Rasio bidan per 100.000 penduduk, nilai capaian 84,64%. Rendahnya nilai capaiannya tersebut disebabkan jumlah bidan yang berada di Kota Ternate hanya sebanyak 237 orang kondisi ideal sesuai SPM seharusnya 280 orang sehingga masih kekurangan sebanyak 43 orang.
5. Persentase kecamatan bebas rawan gizi, nilai capain 83,00%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan juga faktor ekonomi, yaitu kurang tersedianya pangan yang cukup untuk kebutuhan keluarga.
6. Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu, nilai capaian 0,00%, hal tersebut disebabkan pada tahun anggaran 2013

ketersediaan dana untuk melaksanakan program Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 sangat terbatas/defisit sehingga program pemberian bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan.


7. Persentase PNS yang diberikan sanksi nilai capaian 59,22% hal tersebut disebabkan adanya komitmen yang kuat dari Walikota Ternate untuk menegakan disiplin dengan memberikan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga pada tahun 2013 terdapat 103 PNS yang diberi sanksi.
8. Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan, nilai capaian 82,35%. Rendahnya nilai capaian disebabkan rendahnya alokasi anggaran sehingga sesuai target sebanyak 34 kelompok yang dapat diberikan bantuan hanya sebanyak 28 kelompok.
9. Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan, nilai capaian 50,00%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan rendahnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan kontribusi pada pencapaian target indikator sasaran tersebut.
10. Tingkat Inflasi, nilai capaian 56,03%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan adanya peralihan musim yang menyebabkan naiknya tinggi gelombang diperaian Maluku Utara yang mempengaruhi laju distribusi serta kapasitas produksi sektor perikanan dan juga faktor komoditas yang berasal dari kelompok komoditas bergejolak (*volatile foods*) yang merupakan komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.
11. Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan, nilai capaian 78,95%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan minimnya alokasi anggaran yang diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan kontribusi pada pencapaian target indikator sasaran tersebut.

Kelemahan tersebut diatas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya.

Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Ternate, 26 Maret 2014

Wali Kota Ternate



[Handwritten Signature]

Dr. H. Basrah Abdurahman, S.H., M.M.

DAFTAR ISI

| | Hal |
|---|-----------|
| IKHTISAR EKSEKUTIF ----- | i |
| DAFTAR ISI ----- | iv |
| BAB I PENDAHULUAN ----- | 1 |
| A. LATAR BELAKANG ----- | 1 |
| B. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE ----- | 2 |
| C. ORGANISASI ----- | 5 |
| D. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN TAHUN 2013 ----- | 6 |
| E. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013 ----- | 11 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ----- | 13 |
| A. RENCANA STRATEGIS ----- | 13 |
| a. Visi ----- | 13 |
| b. Misi ----- | 15 |
| c. Permasalahan dan isu-isu pembangunan ----- | 15 |
| d. Tujuan ----- | 20 |
| e. Sasaran ----- | 22 |
| f. Sasaran Prioritas Program Pembangunan Tahun 2013- g. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013 ----- | 30 |
| B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013 ----- | 31 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ----- | 40 |
| A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ----- | 40 |
| a. Penetapan Kategori Nilai Capaian ----- | 40 |
| b. Pengukuran Kinerja ----- | 40 |
| B. ANALISA CAPAIAN KINERJA ----- | 52 |
| C. ANALISA TREND CAPAIAN KINERJA ----- | 72 |
| D. AKUNTABILITAS KEUANGAN ----- | 75 |
| BAB IV PENUTUP ----- | 78 |
| Lampiran | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaporan merupakan fase yang sangat penting dalam siklus manajemen. Dalam manajemen moderen, pelaporan merupakan fase terakhir yang dijadikan instrumen untuk evaluasi guna perbaikan manajemen itu sendiri.

INPRES Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, telah mewajibkan setiap penyelenggara Negara untuk membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ditegaskan bahwa Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja.

Laporan akuntabilitas adalah merupakan media pertanggungjawaban kepada publik atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab instansi pemerintah yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran, yang didasarkan pada perencanaan strategik yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Laporan akuntabilitas kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LAKIP Pemerintah Kota Ternate tahun 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kota Ternate sebagai daerah otonom, mempunyai hak untuk menyelenggarakan otonomi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, juga mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kewenangan yang diberikan. Salah satu media pertanggungjawaban tersebut adalah LAKIP yang dibuat setiap berakhirnya tahun anggaran.

B. GAMBARAN SINGKAT KOTA TERNATE

a. Yuridis

Secara yuridis peningkatan status Kota Ternate dari Kota Administratif Ternate menjadi Kotamadya Ternate didasarkan pada Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1999 Tanggal 27 April 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Ternate. Aktivitas pemerintahan dan kemasyarakatan di Kota Ternate pada awal pembentukannya, secara administratif dibagi menjadi 3 Kecamatan dan terdiri dari 58 Desa/Kelurahan. Dinamika pelaksanaan pembangunan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dan masyarakat telah membawa perubahan yang ditandai perkembangan dan kemajuan di berbagai aspek. Dengan memperhatikan aspirasi masyarakat yang berkembang dan pertimbangan rentang kendali pemerintahan, wilayah tertentu dimana perkembangannya dipandang memungkinkan untuk ditingkatkan status administrasinya seperti Moti, terkait dengan itu, Pemerintah Daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor: 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Moti yang sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pulau Ternate. Sebagai konsekuensi pelaksanaan Perda dimaksud, 4 (empat) Desa yang ada di Moti dimekarkan dan ditingkatkan statusnya menjadi 6 (enam) Kelurahan.

Perkembangan lain yang dicapai dari segi administrasi pemerintahan adalah dimekarkannya 2 (dua) Kelurahan di Batang Dua, Kecamatan Pulau Ternate menjadi 5 (lima) Kelurahan, melalui Peraturan Daerah Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelurahan Lelewi, Bido dan Pantai Sagu.

Selanjutnya pada akhir tahun 2007 Kota Ternate dimekarkan menjadi 6 Kecamatan, yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Moti, Kecamatan Batang Dua dan Kecamatan Kota Ternate Tengah dan 11 (sebelas) kelurahan baru yang dimekarkan pada tahun 2007. Pada tahun 2009 dibentuk Kecamatan Hiri dan dilakukan pemekaran kelurahan baru sebanyak 3 (tiga) kelurahan.

Tabel: Wilayah Kecamatan & Jumlah Kelurahan

| No | Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
|--------|-----------------|------------------|
| 1 | Ternate Utara | 14 |
| 2 | Ternate Tengah | 15 |
| 3 | Ternate Selatan | 17 |
| 4 | Pulau Ternate | 13 |
| 5 | M o t i | 6 |
| 6 | Hiri | 6 |
| 7 | Batang Dua | 6 |
| Jumlah | | 77 |

b. Luas Wilayah dan Letak Geografis Daerah

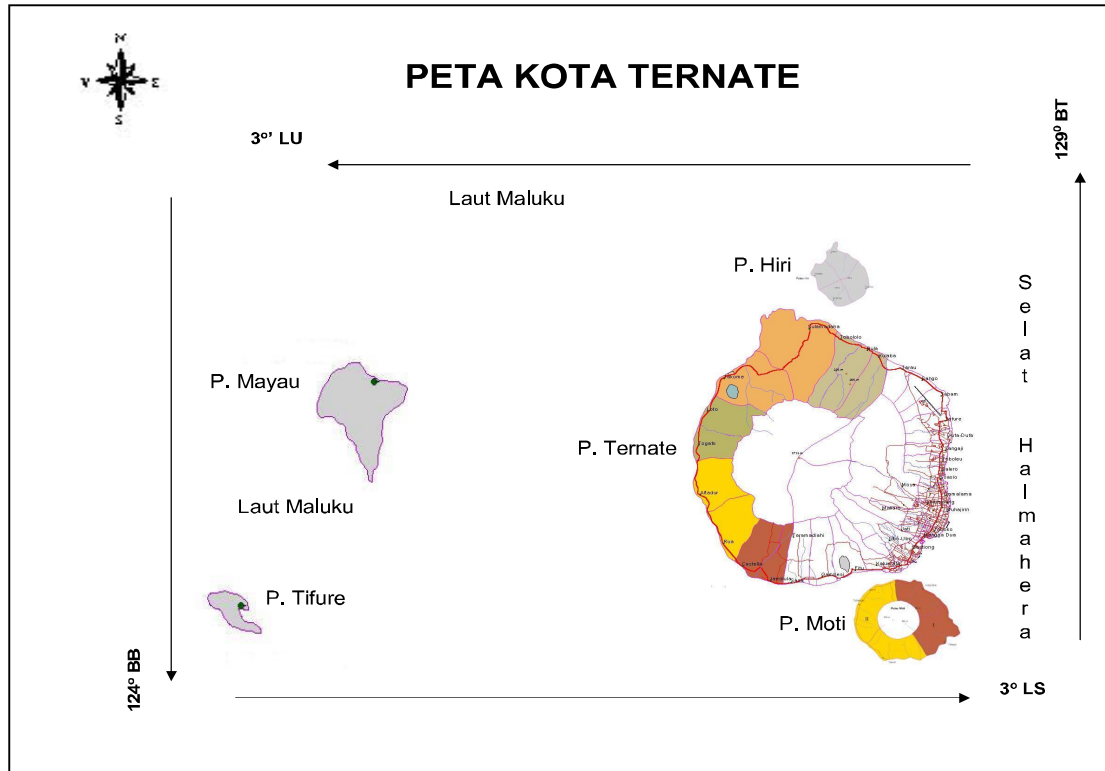
Wilayah Kota Ternate terletak pada 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur. Luas wilayah Kota Ternate adalah 5.795,40 Km² dan didominasi oleh wilayah laut 5.547,55 Km² sedangkan luas daratan 162,03 Km². Kota Ternate berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Laut Maluku;
- Sebelah Selatan dengan Laut Maluku;
- Sebelah Timur dengan Selat Halmahera; dan
- Sebelah Barat dengan Laut Maluku.

Kota Ternate adalah Kota Kepulauan dan terdiri dari 8 pulau, meliputi:

1. Pulau Ternate
2. Pulau Hiri
3. Pulau Moti
4. Pulau Mayau
5. Pulau Tifure
6. Pulau Maka
7. Pulau Mano
8. Pulau Gurida

Peta Wilayah Administrasi Kota Ternate



c. Topografi

Sebagian besar Kota Ternate adalah daerah bergunung, berbukit, dan terdiri dari pulau vulkanis, karang dengan kondisi jenis tanah sebagai berikut:

1. *Rogusal*:
 - Pulau Ternate
 - Hiri
 - Moti
2. *Rensika*:
 - Pulau Mayau
 - Pulau Tifure
 - Pulau Maka
 - Pulau Mano
 - Pulau Gurida

d. Kondisi Iklim

Sebagaimana umumnya daerah Maluku Utara yang didominasi wilayah laut, Kota Ternate sangat dipengaruhi oleh iklim laut karena mempunyai tipe iklim tropis

yang terdiri dari dua musim (*Utara-Barat* dan *Timur-Selatan*) yang seringkali diselingi dengan dua kali masa pancaroba di setiap tahunnya. Kondisi topografi Kota Ternate juga ditandai dengan keragaman ketinggian dari permukaan laut (Rendah: 0-499 M, Sedang: 500-699 M, dan Tinggi: lebih dari 700 M). Dengan kondisi tersebut, Kota Ternate merupakan wilayah kepulauan yang terdiri dari 8 pulau, 5 pulau yaitu pulau Ternate, Hiri, Moti, Mayau, dan pulau Tifure didiami penduduk, sedangkan untuk 3 pulau kecil yaitu pulau Maka, Mano dan Gurida, tidak berpenghuni.

e. Demografis

Sampai dengan akhir tahun 2012, jumlah penduduk Kota Ternate berdasarkan data dari BPS Kota Ternate tahun 2012 sebanyak 191.053 jiwa. Penduduk tersebut tersebar pada 7 (tujuh) kecamatan, yaitu: Wilayah Kecamatan Ternate Selatan 65.582 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Utara 46.886 jiwa, Wilayah Kecamatan Ternate Tengah 53.571 jiwa, Wilayah Kecamatan Pulau Ternate 15.116 jiwa, Wilayah Kecamatan Moti 4.526 jiwa, Wilayah Kecamatan Batang Dua 2.559 jiwa, Wilayah Kecamatan Hiri 2.813 jiwa.

C. ORGANISASI

Pembentukan Perangkat Daerah Pemerintah Kota Ternate sebagai realisasi dari Peraturan Pemerintah Nomor: 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah, sampai dengan akhir tahun 2013 Pemerintah Kota Ternate telah membentuk Perangkat Daerah sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Sekretariat Daerah;
- 2) 1 (satu) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3) 17 (tujuh belas) organisasi Dinas Daerah;
- 4) 8 (delapan) organisasi Badan Daerah;
- 5) 1 (satu) Inspektorat;
- 6) 4 (empat) organisasi Kantor;
- 7) 3 (tiga) Perusahaan Daerah;
- 8) 7 (tujuh) organisasi Pemerintah Kecamatan;
- 9) 77 (tujuh puluh tujuh) Pemerintah Kelurahan.

D. ARAH KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Arah Kebijakan Umum Pembangunan Kota Ternate tahun 2013 yang diatur dengan Peraturan Walikota Ternate Nomor: 14 Tahun 2010 Tanggal 12 April 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Ternate tahun 2013, adalah Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik dan Peningkatan Ekonomi Rakyat, yang selanjutnya akan dianalisa Program/Kegiatan untuk diselaraskan dalam tahapan proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan sebagai acuan pembahasan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Ternate tahun 2013.

Program Prioritas Pembangunan Kota Ternate adalah sebagai berikut:

- 1. Peningkatan dan penataan Infrastruktur Perkotaan serta Percepatan dan Pemerataan Infrastruktur pada Wilayah Kecamatan,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Mempercepat pembangunan sarana infrastruktur wilayah pada Kecamatan-Kecamatan di luar kawasan perkotaan.
 - b. Pemerataan pelayanan air bersih pada kawasan dataran tinggi di Pulau Ternate dan pada Kecamatan di luar Ternate (Hiri, Moti dan batang Dua).
 - c. Pemerataan pelayanan Listrik pada Kelurahan yang tidak terjangkau layanan PLN, melalui sumber energi alternatif lainnya.
- 2. Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
 - a. Memperbaiki Sarana Pendidikan, pemerataan tenaga pengajar dan peningkatan mutu pendidikan pada semua tingkatan.
 - b. Mewujudkan Pendidikan Dasar yang berkualitas dengan mengalokasi dana penunjang kegiatan sekolah melalui APBD untuk menutupi kekurangan dana Bantuan Operasional Sekolah.
 - c. Menyediakan Buku Pelajaran di Perpustakaan Sekolah untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mengurangi Beban Orang Tua Siswa.
 - d. Memfasilitasi dan Membantu Guru untuk Mendapatkan Gelar S1.
 - e. Memberikan Beasiswa kepada Pelajar Berprestasi mulai SD, SMP, SMA, yang diprioritaskan pada siswa dari Warga Kurang Mampu dengan indikator penilaian yang terukur dan konsisten.

- f. Memberikan Beasiswa kepada Guru Berprestasi untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan mutu pendidikan di daerah.
 - g. Memberikan Insentif kepada Guru yang bertugas di daerah terpencil, atau daerah dengan jarak jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.
- 3. Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas**, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
- a. Perbaiki Sarana Prasarana Pelayanan Kesehatan, Ketersediaan dokter dan Tenaga Keperawatan, serta Obat-obatan pada setiap Puskesmas/Pustu/Polindes, untuk menjamin kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.
 - b. Memberikan insentif kepada Bidan Desa atau tenaga Kesehatan di daerah terpencil, atau daerah dengan jangkauan dan tingkat kesulitan transportasi.
 - c. Memberikan Beasiswa kepada Dokter, Tenaga Medis Putra/Putri Daerah Berprestasi terutama dari Keluarga Kurang Mampu untuk melanjutkan ke jenjang Spesialis atau ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
 - d. Pelayanan Jamkeda, secara efektif, tepat sasaran, pelayanan yang menjangkau seluruh masyarakat miskin, dengan pengawasan dan evaluasi berkala agar penyelenggarannya terus diperbaiki.
 - e. Menetapkan kebijakan subsidi silang; setiap pasien rawat inap pengguna fasilitas VIP, Kelas I dan Kelas II, mensubsidi pasien kurang mampu yang menggunakan fasilitas rawat inap Kelas III.
 - f. Memberikan layanan Ambulance dan Mobil Jenazah Gratis serta menggratiskan Layanan Bersalin untuk Warga Kurang Mampu.
- 4. Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat**, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
- a. Menetapkan *One Village One Program* (Satu Kelurahan, Satu Program Unggulan), yang didahului dengan penguatan kapasitas Aparatur, pemantapan Visi Misi Kelurahan dan identifikasi potensi unggulan setiap Kelurahan.
 - b. Membangun Rumah layak Huni Keluarga Kurang Mampu melalui dana stimulus Pemerintah Daerah dengan cara menggali keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari).

- c. Membangun infrastruktur lingkungan melalui dana stimulus pemerintah daerah dengan cara menggalang keswadayaan masyarakat (Gotong Royong/Bari).
 - d. Santunan Kematian Warga Kurang Mampu.
 - e. Bantuan Dana Rutin untuk Masjid/Gereja dan tempat ibadah lainnya.
 - f. Dana Pembinaan Generasi Muda untuk kegiatan usaha produktif dan atau pengembangan prestasi, minat dan bakat.
 - g. Menggalang kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan terhadap *One Village One Program*.
- 5. Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukun Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keserasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
- a. Penataan kawasan Pasar Gamalama, Tapak I Plus dan Tapak II, sebagai sentra perekonomian modern dengan aksentuasi ornamen kebudayaan lokal.
 - b. Mengoptimalkan Pasar Bastiong, Pasar Dufa-Dufa, Pasar Kotabaru dan Pasar Sasa sebagai Pasar Tradisional dengan dukungan regulasi pemerintah.
 - c. Penataan taman kota dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan sebagai area publik yang asri, nyaman dan tertib.
 - d. Pemantapan Visi dan penataan kawasan Kota Baru berbasis pendidikan dan berciri lokal secara terpadu dan akomodatif terhadap masyarakat setempat.
 - e. Penataan area depan kedaton kesultanan, lapangan Ngara Lamo, Dodoku Ali sebagai ruang terbuka hijau berciri budaya, yang dijadikan alun-alun kota dan taman ekspresi seni budaya.
 - f. Mendorong program partisipatif untuk mewujudkan Ternate sebagai kota pesisir yang Hijau, Asri, Bersih, Nyaman, dan Ramah Lingkungan.
 - g. Mewujudkan Ternate Bebas Sampah dan Bebas Banjir, yang diutamakan pada kawasan perkotaan dan kawasan lainnya yang menimbulkan kesan kumuh.
- 6. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawah, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif, dan Responsif,** dengan kegiatan pokok sebagai berikut:
- a. Melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien.

- b. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional, bersih (bebas KKN), kreatif, inovatif dan responsif dalam optimalisasi kinerja fungsi dan tugasnya.
- c. Mengubah *mainset* aparatur yang berorientasi program dengan target serta manfaat terukur, aparatur yang berkarakter demokratis dan terbuka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
- d. Menyelenggarakan prinsip *reward and punishman* untuk menilai kinerja dan prestasi aparatur dalam rotasi maupun promosi jabatan.
- e. Mengembangkan kompetensi sumber daya aparatur yang diorientasikan pada peningkatan skill dan ketrampilan yang benar-benar dibutuhkan.
- f. Penyerahan urusan (kewenangan) dari Pemerintah Kota kepada Kecamatan dan Kelurahan di bidang pelayanan umum.

7. Peningkatan Ekonomi Rakyat, Melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Memberikan kemudahan izin usaha pada masyarakat kurang mampu.
- b. Memberikan kepastian hukum dan kemudahan izin usaha bagi investor.
- c. Pengembangan Koperasi, UMKM, Pedagang Tradisional dan PKL melalui fasilitas bantuan modal usaha, berupa dana bergulir atau pinjaman lunak, dengan pendampingan manajemen, penyediaan sarana produksi dan akses pasar.
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Buruh dan Pekerja pada sektor swasta melalui peningkatan Upah Minimum Kota.
- e. Memberikan bantuan modal usaha kepada Kelompok Perempuan dan Kelompok Pemuda.
- f. Menggalakkan kursus dan pelatihan kepada pengangguran terbuka *unskill*, untuk diarahkan pada usaha kecil menengah yang didukung penyertaan modal dan pendampingan manajemen.

8. Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Membentuk lembaga perijinan dalam mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Menghilangkan segala bentuk pungutan liar yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan merusak citra pelayanan publik.
- c. Menyediakan Database Kependudukan Online.
- d. Melayani pembuatan KTP, KK dan Akta Kelahiran Gratis dan dilimpahkan ke Kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

9. Pengembangan Masyarakat Kawasan Pesisir secara Berkelanjutan, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan pemetaan potensi masyarakat pesisir untuk merumuskan program pengembangan yang tepat.
- b. Bantuan fasilitas sarana dan peralatan kepada Petani dan Nelayan untuk meningkatkan produktifitasnya.
- c. Memberikan bantuan modal usaha dan pendampingan kepada kegiatan pengolahan hasil produksi pertanian dan perikanan.
- d. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pendampingan pemberdayaan.

10. Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Penguatan Kurikulum Pendidikan Agama dan Kurikulum Muatan Lokal tentang Budaya dan Adat Istiadat Ternate pada semua tingkatan sekolah sejak Pendidikan Usia Dini hingga Perguruan Tinggi.
- b. Mengoptimalkan fungsi Taman Pengajian Al-Qur'an sebagai tempat pendidikan baca tulis Al-Qur'an, sekaligus memberikan pemahaman tentang Syariah, Akhlaq, Budi Pekerti sejak Usia Dini dan Sekolah Dasar.
- c. Mengoptimalkan pembinaan Jemaat dan pembinaan Ummat Agama non Muslim sesuai dengan syariat agamanya.
- d. Membina Kerukunan antar Ummat Beragama, antar Suku, Etnis dan Subetnis, melalui kegiatan sosial keagamaan dan kebudayaan. Memanfaatkan momentum Hari-hari Besar Nasional, Hari-hari Besar Keagamaan dan Hari-hari Besar Daerah dengan kegiatan bernuasa Keagamaan dan Kebudayaan. Melestarikan Situs, Artifak, Dokumen Sejarah dan Aset Seni Budaya Kota Ternate.

- e. Menjamin kesejahteraan Imam Mesjid, Pendeta, Guru Mengaji, Guru TPA dan Pembimbing Jemaat.
- f. Menjamin pelestarian adat dan budaya Ternate.

11. Penegakan Supermasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif, dengan kegiatan pokok sebagai berikut:

- a. Mendorong regulasi daerah yang menjamin kepastian hukum dan kemudahan investasi.
- b. Memperkuat regulasi terhadap partisipasi publik yang dinamis, efektif dan bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Memperkuat regulasi yang menjamin Standar Pelayanan Minimal pada bidang pelayanan dasar untuk publik.
- d. Meninjau kembali Peraturan Daerah yang berdampak pada tidak kondusifnya keuangan daerah, terjadinya ekonomi biaya tinggi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat.
- e. Memberikan layanan bantuan hukum secara gratis kepada warga kurang mampu yang membutuhkannya.
- f. Melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Ormas dan OKP dalam melakukan kampanye dan advokasi hak-hak hukum kepada masyarakat.

E. PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2013

Prioritas pembangunan tahun 2013 merupakan tahapan untuk memperkuat landasan pembangunan menuju Kota Ternate Bahari Berkesan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Disamping itu juga dilakukan pemetaan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib.

Pembangunan di tahun 2013 lebih menegaskan komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di tahap **III: Tata Pemerintahan yang Baik dan Peningkatan Ekonomi Rakyat**, meliputi:

1. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik; dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, responsive; yang diarahkan peningkatan pada terwujudnya *good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat.
2. Peningkatan Ekonomi Rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan lapangan Kerja; yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Petani, Nelayan, Pekebun, Peternak, Buruh dan Pekerja, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Pedagang Kaki Lima, dan Pedagang Tradisional, menuju kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*).

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

a. Visi

Visi adalah suatu gambaran ideal yang ingin dicapai atau artikulasi dari citra, nilai, arah dan tujuan yang hendak dicapai.

Dengan memperhatikan keinginan luhur dari para pendiri bangsa serta cerminan hati sanubari rakyat Kota Ternate untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera lahir dan batin, memperhatikan isu strategis dalam lima tahun mendatang serta memperhatikan amanat konstitusional yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, maka Visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah: **Terwujudnya Ternate menjadi Kota “Berbudaya, Agamais, Harmonis, Mandiri, Berkeadilan dan Berwawasan Lingkungan” (Bahari Berkesan).**

Penjelasan Visi tersebut, yaitu:

- 1. Ternate Berbudaya**, bahwa kebijakan pemerintah maupun perilaku masyarakat haruslah mencerminkan nilai-nilai budaya *adat se atorang* sebagai sumber nilai yang terbukti ampuh menjadi spirit sosial dan spirit moral *Moloku Kie Raha* pada masa kejayaannya. Hal ini diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan terhadap nilai budaya dan *adat se atorang* dengan mengupayakan pelestariannya, sekaligus menjadikannya sistem nilai yang membentuk kesadaran sosial yang diharapkan terefleksi dalam perilaku sosial masyarakat.
- 2. Ternate Agamais**, adalah upaya menciptakan serta menumbuhkan kesadaran keberagamaan dan spiritualitas di dalam masyarakat yang dimulai sejak masa kanak-kanak dan usia remaja, yang diarahkan untuk menangkal berbagai dampak buruk modernitas upaya mewujudkan masyarakat bermartabat, berakhlak, berbudi pekerti luhur, toleran, penuh belas kasih, yang menempatkan nilai keberagamaan sebagai basis moral yang membentuk kesadaran sosial dan tercermin dalam kehidupan sosial yang santun, religius, aman dan tentram.

3. **Ternate Harmonis**, artinya mengupayakan terwujudnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan lingkungan sosial dan lingkungan fisik perkotaan, melalui tata ruang perkotaan terpadu, serasi, nyaman dan sehat, yang mampu mengakomodasi dinamika ekonomi, sosial budaya, dan politik secara seimbang melalui ketersediaan ruang publik yang representatif bagi seluruh masyarakat tanpa kesan pengabaian dan diskriminasi, sehingga menumbuhkan rasa memiliki terhadap Kota Ternate, terpeliharanya persatuan dan kesatuan, meningkatkan wawasan kebangsaan, kerukunan dalam pembauran, semangat persaudaraan, sikap toleran baik antar umat beragama, antar etnik, maupun antar kelompok.
4. **Ternate Mandiri**, artinya menjadikan Ternate Kota Jasa dan Perdagangan sebagai pusat perekonomian Maluku Utara, melalui penataan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, ekonomis, kompetitif, dukungan infrastruktur ekonomi yang memadai, kepastian hukum, kemudahan investasi. Sekaligus mendorong kreativitas dan produktivitas melalui pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah agar lebih produktif dan berdaya saing, yang diarahkan pada kemandirian ekonomi masyarakat.
5. **Ternate Berkeadilan**, artinya mewujudkan prinsip persamaan hak warga negara dihadapan hukum dan pemerintahan yang diarahkan pada penegakan supremasi hukum, perlindungan HAM, keterbukaan akses dan kesempatan yang merata dalam pelayanan publik di semua bidang yang diarahkan secara sungguh-sungguh pada upaya menjamin kesejahteraan rakyat melalui kebijakan APBD yang memihak rakyat, serta kualitas pelayanan publik, pemerataan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, teratasinya masalah perkotaan seperti kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan sektoral, serta pemberdayaan masyarakat sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*).
6. **Ternate Berwawasan Lingkungan**, artinya mengupayakan penataan pembangunan perkotaan yang seluruh arah perkembangannya didasarkan pada keasrian dan keaslian potensi lingkungan fisik dan lingkungan sosial budaya, dengan memperhatikan keseimbangan ekologis. Hal ini diarahkan pada upaya revitalisasi lingkungan fisik perkotaan dan lingkungan hidup yang

hijau, asri, nyaman, dan sehat melalui penataan yang terpadu dan serasi antara lingkungan hidup dan lingkungan sosial yang diharapkan memberikan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian kepada warga masyarakat, sekaligus mengupayakan pelestarian ekologi pantai, dan menghindari kecenderungan eksploitasi lingkungan fisik dan ekologi pantai sebagai dampak pengembangan *water front city*, dan perilaku masyarakat yang relatif belum ramah lingkungan.

b. Misi

Misi pembangunan Kota Ternate dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Ternate Tahun 2011-2015 adalah sebagai berikut;

1. Mewujudkan Ternate yang agamais;
2. Mewujudkan pemerataan sarana dan prasarana perekonomian yang lebih representatif;
3. Membangun Ternate sebagai kota pesisir berbasis lingkungan;
4. Membangun Ternate sebagai kota pariwisata berciri budaya dan bahari;
5. Membangun Ternate sebagai kota terbuka, demokratis dan adil;
6. Membangun Ternate yang sehat dan sejahtera.

c. Permasalahan dan Isu-isu Pembangunan

Permasalahan dan isu-isu pembangunan Kota Ternate 2011-2015 adalah:

1. Masalah Sumber Daya Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- a) Profesionalitas serta kompetensi aparatur birokrasi, relatif belum memadai sehingga belum mampu secara merata dan adil mendorong program dan kebijakan bagi kemandirian daerah, menjamin kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar bidang pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih, dan utilitas lainnya.
- b) Mentalitas aparatur cenderung berorientasi proyek (*project oriented*) ketimbang berorientasi program. Kelemahan ini berimplikasi pada perencanaan program pembangunan antar wilayah dan antar sektor relatif belum integratif dan sinergi, selanjutnya berimplikasi pada belum terpenuhinya azas efisiensi, efektifitas, dan ekonomis dalam pengelolaan

dan pemanfaatan anggaran secara patut, dan memberikan kemanfaatan yang luas serta berkeadilan kepada masyarakat.

- c) Belum efektifnya akses partisipasi publik yang berkualitas dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dalam menjamin akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran (*clean governance*) sebagai implementasi prinsip-prinsip *good governance*.
- d) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik terutama pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, listrik, air bersih dan utilitas lainnya. Keluhan utamanya berkaitan dengan kepastian waktu, biaya dan tempat.
- e) Belum terintegrasinya sistem pelayanan publik sehingga menimbulkan biaya tinggi akibat faktor ketidakpastian pelayanan.
- f) Rendahnya tingkat transparansi dan akuntabilitas serta kurangnya akses publik dalam perumusan kebijakan pembangunan kota.
- g) Pergeseran paradigma pemerintah bukan lagi sebagai penguasa tetapi sebagai pelayan rakyat. Karena itu tugas camat/lurah mengikuti tugas walikota sebagai pelayan rakyat. Berdaya tidaknya kecamatan/kelurahan sangat tergantung pada pelimpahan wewenang oleh walikota. Besaran kewenangan kecamatan sangat ditentukan oleh urusan yang dilimpahkan oleh walikota.

2. Masalah Pemerataan Pembangunan, Akses Perekonomian dan Kesejahteraan

- a) Tidak seimbang pertumbuhan antar wilayah, terutama wilayah Utara dan Selatan Ternate, termasuk wilayah Kecamatan di luar Pulau Ternate, seperti Moti, Hiri dan Batang Dua. Kesenjangan pembangunan antar wilayah ini berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- b) Belum sinerginya kegiatan ekonomi perkotaan dengan kegiatan ekonomi pedesaan, sehingga wilayah luar cenderung mengalami dampak penurunan pertumbuhan (*backwash effects*).
- c) Kurangnya akses masyarakat, terutama pelaku usaha jasa konstruksi terhadap proyek pemerintah akibat terjadinya praktek mafia ekonomi dan monopoli kepada beberapa pengusaha. Sulitnya pengusaha kecil, petani, nelayan dan koperasi mendapat sumber permodalan dan pendampingan manajemen pengembangan usaha.

- d) Informasi potensi dan peluang usaha belum optimal dipromosikan, padahal Kota Ternate sebagai kota perdagangan dan jasa utama di Maluku Utara memiliki peluang investasi yang cukup tinggi.
- e) Akses usaha yang belum merata, dan rendahnya produktifitas ketenagakerjaan. Ketergantungan terhadap pasokan bahan kebutuhan pokok dari luar adalah situasi rentan terhadap kemandirian ekonomi rakyat.

3. Masalah Penataan Kawasan Perkotaan

- a) Tidak terkendalinya pertumbuhan penduduk baik akibat penambahan penduduk alamiah maupun akibat urbanisasi sehingga melahirkan kawasan pemukiman kumuh dan kemiskinan kota.
- b) Karena keterbatasan lahan kota dan inkonsistensi kebijakan penataan ruang membuat terjadi alih fungsi lahan secara besar-besaran baik di wilayah pesisir pantai maupun kawasan hutan lindung.
- c) Belum terintegrasinya keruangan (*spatial integration*) secara seimbang pada setiap simpul strategis wilayah perkotaan.
- d) Belum tersedianya ruang terbuka hijau (RTH) bagi warga kota akibat kebijakan komersialisasi kawasan perkotaan serta desain tata ruang yang belum memihak kebutuhan publik.
- e) Kurangnya ruang untuk mewadahi kegiatan PKL yang menimbulkan marginalisasi sektor informal dari sistem ekonomi perkotaan secara *integratif*.
- f) Terbaikannya potensi kawasan pesisir pantai dengan tidak tersedianya prasarana dan sarana kelautan yang berakibat pada menurunnya aktivitas pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir pantai.
- g) Belum mandiri dan terarahnya pembangunan Kota Baru sehingga mengakibatkan masyarakat pada kawasan sekitar membangun permukimannya tanpa memperhatikan penataan wilayah dan kawasan yang sesuai dengan konsep penataan ruang.
- h) Kesemrawutan kota, akibat pertumbuhan kendaraan bermotor tanpa diimbangi oleh ketersediaan infrastruktur jalan dan regulasi yang sering tidak konsisten. Minimnya lahan parkir menjadi penyebab utama kemacetan di beberapa pusat perdagangan. Ruang publik bagi pejalan kaki tidak lagi berfungsi karena difungsikan bagi PKL.

4. Masalah Banjir, Sampah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- a) Menurunnya kualitas fisik lingkungan perkotaan, sebagai implikasi dari eksploitasi pembangunan, serta pengelolaan kawasan yang tidak diikuti dengan penataan ruang yang baik dan konsisten.
- b) Penataan *drainase* dan pengelolaan persampahan yang belum memadai
- c) Minimnya kesadaran warga terhadap lingkungan hidup yang baik menimbulkan masalah banjir, sanitasi yang buruk dan terjadinya abrasi pada wilayah pantai.
- d) Kebijakan pemerintah kota yang belum memperhatikan daya dukung lingkungan dalam pembangunan perkotaan.

5. Masalah Pendidikan dan Kesehatan

- a) Kualitas *output* pendidikan yang masih rendah sehingga belum mampu menjawab kesempatan kerja yang tersedia.
- b) Rendahnya kualitas moral anak didik yang tercermin dalam perilaku bermasyarakat.
- c) Belum meratanya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang mudah, murah, berkualitas dan merata, terutama masyarakat yang berada di Kecamatan Moti, Hiri dan Pulau Batang Dua.
- d) Komersialisasi kesehatan ini ditandai dengan mahalnya biaya kesehatan akibat pelayanan Rumah Sakit yang belum profesional akibat Praktek Dokter Ahli lebih memilih berpraktek di Rumah Sakit swasta atau klinik ketimbang melayani pasien di RSUD.
- e) Manajemen pelayanan Rumah Sakit yang belum mengakomodasi masyarakat miskin (jamkesda) dan Pemegang Askes.
- f) Masih rendahnya proporsi anggaran kesehatan dalam APBD.
- g) Kematian ibu dan bayi, yang masih cukup tinggi adalah akibat dari buruknya akses pelayanan kesehatan yang tersedia.

6. Masalah Sosial Budaya dan Keagamaan

- a) Masih rendahnya kesadaran budaya hidup toleran masyarakat terutama dalam penutupan jalan untuk acara-acara tertentu.
- b) Fenomena meningkatnya kekerasan terhadap perempuan baik dalam rumah tangga (KDRT), maraknya kasus perkosaan dan meningkatnya angka perceraian di Kota Ternate adalah fenomena yang harus menjadi

perhatian kita semua. Fenomena PSK di Kota Ternate adalah penyakit sosial yang berhubungan erat dengan kehidupan ekonomi dan isu moralitas. Tingkat pendidikan yang ditempuh oleh kaum wanita dan terpinggirnnya peran wanita dalam pembangunan, seperti masih bias gender dalam penerimaan pegawai, promosi jabatan dan diskriminasi dalam dunia kerja. Fenomena ini tidak lagi menjadi isu domestik perempuan tetapi isu mendasar pembangunan Kota Ternate ke depan.

- c) Belum sinerginya integrasi sosial masyarakat dalam upaya peningkatan partisipasi yang lebih luas dan efektif dalam membuat kebijakan publik yang menyangkut masyarakat.
- d) Penanganan masalah sosial budaya yang terkait dengan masalah kemiskinan perkotaan, gesekan kepentingan antar masyarakat dan antar kampung.
- e) Makin menjauhnya sebagian besar masyarakat dari nilai adat budaya lokal, termasuk pemaknaan atas *adat se atorang* sebagai sumber nilai dan etos sosial, yang terbukti ampuh menjadi nilai identitas masyarakat Ternate pada masa kejayaannya.
- f) Berkurangnya perhatian dan kesadaran pemerintah daerah, dan *stakeholder* di daerah, untuk melakukan rekonstruksi nilai budaya dan kearifan lokal.
- g) Belum maksimalnya peran lembaga keagamaan serta perhatian yang hanya fokus pada sarana prasarana tanpa penguatan basis nilai relegiusitas semakin menjauhkan warga dari nilai-nilai agama.
- h) Masih tingginya angka buta baca Al-Quran di Kota Ternate.

7. Masalah Keuangan dan Kemandirian Fiskal

- a) Kurangnya kemandirian fiskal Kota Ternate tergambar dari rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan APBD. Ketimpangan fiskal yang tinggi menunjukkan belum optimalnya kinerja sektor ekonomi sehingga kontribusi pendapatan pajak dan retribusi belum signifikan dalam Pendapatan Daerah Kota Ternate.
- b) APBD dibuat seringkali lebih berpihak kepada penentu kebijakan daripada kepentingan rakyat. Kurangnya alokasi anggaran untuk belanja modal (investasi) padahal belanja modal ini penting bagi stimulus ekonomi kota di

masa yang akan datang, terutama infrastruktur seperti pembangkit tenaga listrik, air minum dan transportasi.

8. Masalah Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di level makro ternyata tidak diikuti pada ekonomi riil di level mikro. Fenomena kemiskinan dan pengangguran adalah gambaran tidak terkoneksinya gambaran makro ekonomi dan kehidupan ekonomi masyarakat secara umum. Inflasi yang masih cukup tinggi telah menurunkan daya beli. Kurangnya akses sumber daya ekonomi dan belum meratanya pembangunan semakin memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat secara umum.

d. Tujuan

Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Ternate Tahun 2011-2015 berdasarkan 11 (sebelas) Program Prioritas adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur pada Wilayah Kecamatan, yang diarahkan pada percepatan pengembangan infrastruktur secara merata dan berkeadilan, terutama pada kecamatan-kecamatan di luar kawasan perkotaan untuk membuka keterisolasian, serta memungkinkan terjadinya mobilitas arus barang dan manusia yang mempercepat perkembangan secara merata pada semua wilayah kecamatan;
2. Mewujudkan pendidikan murah, terjangkau dan berkualitas, yang diarahkan pada upaya peningkatan sumber daya manusia, khususnya peningkatan derajat pendidikan melalui perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau, sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup, dan mutu yang terus membaik;
3. Mewujudkan kesehatan murah, terjangkau dan berkualitas, diarahkan pada upaya meningkatkan sumber daya manusia, melalui peningkatan derajat kesehatan dengan perluasan akses yang mudah, murah, terjangkau, dukungan sarana dan fasilitas memadai, ketersediaan dokter, tenaga kesehatan dan keperawatan yang cukup, dan mutu pelayanan yang terus membaik;
4. Kebijakan anggaran (APBD) yang proporsional dan pro rakyat, diarahkan pada kebijakan anggaran (APBD) yang proporsional dan pro rakyat, yang

- diprioritaskan pada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat serta membiayai program pembangunan yang strategis, juga program populis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, melalui disain program berbasis keswadayaan dan berciri budaya;
5. Penataan, pengendalian dan pemanfaatan ruang kota yang serasi antara kebutuhan dan daya dukung lahan, antara aspek topografi dan kawasan pantai/pesisir berbasis keterpaduan dan keserasian lingkungan sosial budaya dan ekologis, yang diarahkan pada penataan infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu untuk mendukung interaksi spasial, mobilitas dan aktivitas perkotaan yang tertib menuju terwujudnya Kota Ternate yang harmoni, sehat, aman, dan nyaman dan berciri budaya serta berwawasan lingkungan;
 6. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawa, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif, dan responsif, yang diarahkan pada terwujudnya *good government*, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat;
 7. Peningkatan ekonomi rakyat melalui pengembangan koperasi, usaha mikro kecil menengah dan perluasan lapangan kerja, yang diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional, menuju pada kemandirian dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*);
 8. Pelayanan publik yang cepat, murah dan mudah, yang diarahkan pada terwujudnya pelayanan publik oleh aparatur yang profesional, dengan pelayanan yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas;
 9. Pengembangan masyarakat kawasan pesisir secara berkelanjutan, yang diarahkan pada peningkatan kemandirian masyarakat, melalui pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis potensi pesisir, melalui pengembangan usaha mikro kecil, menengah, koperasi yang mengarah pada produktifitas, dan kemampuan daya saing;

10. Membangun kepedulian sosial, kesadaran nilai keagamaan, kebudayaan dan adat istiadat, yang diarahkan untuk menjawab permasalahan perkotaan seperti menurunnya kesadaran spritualitas keberagamaan, solidaritas sosial dan kesadaran kebudayaan sebagai identitas daerah dan jati diri masyarakat, meningkatkan etos sosial, dan optimalisasi penanggulangan masalah-masalah sosial seperti minuman keras, PSK, narkoba serta permasalahan sosial lainnya.
11. Penegakan supremasi hukum, hak azasi manusia, untuk mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, yang diarahkan untuk menjawab masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah, termasuk upaya mengadakan regulasi daerah yang mampu mendorong partisipasi publik yang dinamis dan konstruktif, serta regulasi untuk menjamin kualitas pelayanan publik.

e. Sasaran

Untuk mewujudkan tujuan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011-2015, maka selanjutnya ditetapkan sasaran strategis Pemerintah Kota Ternate Tahun 2011-2015, yaitu sebagai berikut:

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA |
|---|--|
| 1 | 2 |
| Tujuan 1: Peningkatan dan penataan infrastruktur perkotaan serta percepatan dan pemerataan infrastruktur pada wilayah kecamatan | |
| <p>Sasaran strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah Kecamatan di luar perkotaan 2) Persentase Kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih 3) Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN |

| Tujuan 2: Mewujudkan Pendidikan Murah, Terjangkau dan Berkualitas | |
|---|---|
| <p>Sasaran strategis 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Indeks Pembangunan Manusia 2) Angka melek huruf seluruh penduduk 3) Angka melek huruf pada usia dewasa 4) Nilai UN dan UAS rata-rata <ul style="list-style-type: none"> - Nilai UN rata-rata SD - Nilai UAS rata-rata SD - Nilai UN rata-rata SLTP - Nilai UAS rata-rata SLTP - Nilai UN rata-rata SLTA - Nilai UAS rata-rata SLTA - Nilai UN rata-rata paket A - Nilai UAS rata-rata paket A - Nilai UN rata-rata paket B - Nilai UAS rata-rata paket B - Nilai UN rata-rata paket C - Nilai UAS rata-rata paket C 5) Angka kelulusan <ul style="list-style-type: none"> - SD - SLTP - SLTA 6) Angka putus sekolah <ul style="list-style-type: none"> - SD - SLTP - SLTA 7) Angka rata-rata lama sekolah <ul style="list-style-type: none"> - SD - SLTP - SLTA 8) Angka partisipasi murni <ul style="list-style-type: none"> - SD |

| | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - SLTP - SLTA 9) Angka partisipasi kasar <ul style="list-style-type: none"> - SD - SLTP - SLTA 10) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah <ul style="list-style-type: none"> - SD - SLTP - SLTA 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP 13) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP 16) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA |
| Tujuan 3: Mewujudkan Kesehatan Murah, Terjangkau dan Berkualitas | |
| <p>Sasaran strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1) Angka usia harapan hidup 2) Angka prevalensi penyakit <ul style="list-style-type: none"> - Malaria - TBC - DBD - HIV 3) Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk) <ul style="list-style-type: none"> - Karena penyakit Malaria |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- Karena penyakit TBC- Karena penyakit DBD- Karena penyakit HIV <ol style="list-style-type: none">4) Angka kesembuhan penderita TB paru BTA5) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup6) Angka kematian balita7) Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup8) Persentase balita gizi buruk9) Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk10) Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk11) Rasio bidan per 100.000 penduduk12) Rasio perawat per 100.000 penduduk13) Rasio Posyandu terhadap balita14) Rasio Puskesmas per satuan penduduk15) Rasio Pustu per satuan penduduk16) Persentase kecamatan bebas rawan gizi17) Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam18) Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan19) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan20) Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk<ul style="list-style-type: none">- <i>Annual Malaria Incidence (AMI)</i> |
|--|--|

| | |
|---|---|
| | - Annual Parasite Incidence (API) |
| Tujuan 4: Kebijakan Anggaran (APBD) yang Proporsional dan Pro Rakyat | |
| <p>Sasaran strategis 4: Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Rasio belanja langsung terhadap total belanja 2) Rasio belanja modal terhadap total belanja 3) Persentase peningkatan dana partisipatif kecamatan 4) Persentase peningkatan dana cost sharing PNPM MP 5) Persentase kelurahan yang memiliki satu program unggulan <i>One Village One Program</i> 6) Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan <ul style="list-style-type: none"> - MCK Komunal - Drainase /gorong-gorong - Jalan lingkungan 7) Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu 8) Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda 9) Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikasi tanah |
| Tujuan 5: Penataan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota yang Serasi antara Kebutuhan dan Daya Dukung Lahan, antar Aspek Topografi dan Kawasan Pantai/Pesisir Berbasis Keterpaduan dan Keresasian Lingkungan Sosial Budaya dan Ekologis | |
| <p>Sasaran strategis 5: Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata 2) Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan 3) Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di |

| | |
|--|---|
| | <p>kawasan perkotaan</p> <p>4) Persentase kecamatan bebas sampah dan banjir</p> |
| <p>Tujuan 6: Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik, dengan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang Profesional, Bersih dan Berwibawa, serta Birokrasi yang Efisien, Efektif, Kreatif, Inovatif dan Responsif.</p> | |
| <p>Sasaran strategis 6: Terwujudnya <i>good government</i>, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat</p> | <p>1) Persentase PNS yang memperoleh penghargaan</p> <p>2) Persentase PNS yang diberikan sanksi</p> <p>3) Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eselon III - Eselon IV <p>4) Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan</p> <p>5) Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu</p> <p>6) Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK</p> <p>7) Rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian</p> |
| <p>Tujuan 7: Peningkatan Ekonomi Rakyat melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja</p> | |
| <p>Sasaran strategis 7: Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional</p> | <p>1) Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha</p> <p>2) Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha</p> <p>3) Nilai modal kerja dan investasi UKM</p> |

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> 4) Nilai omzet UKM 5) Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh modal usaha 6) Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan 7) Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan 8) Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan 9) Tingkat pengangguran terbuka 10) Pendapatan perkapita 11) Laju pertumbuhan ekonomi 12) Tingkat Inflasi |
| Tujuan 8: Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah | |
| <p>Sasaran strategis 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah SOP pelayanan publik 2) Jumlah layanan perizinan bebas biaya 3) Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai 4) Rasio penduduk ber-KTP 5) Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran 6) Persentase ketersediaan armada sampah (<i>dumptruck</i>) |
| Tujuan 9: Pelayanan Publik yang Cepat, Murah dan Mudah | |
| <p>Sasaran strategis 9: Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir</p> | <ul style="list-style-type: none"> 1) Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan 2) Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan |

| | |
|---|---|
| Tujuan 10: Membangun Kepedulian Sosial, Kesadaran Nilai Keagamaan, Kebudayaan dan Adat Istiadat | |
| <p>Sasaran strategis 10: Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Persentase siswa SD kelas VI beragama islam dapat baca tulis Al-Quran 2) Jumlah Taman Pengajian Al-Quran 3) Jumlah pertemuan forum antar umat beragama 4) Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan 5) Jumlah regulasi terkait permasalahan penyakit sosial masyarakat 6) Menurunnya pertumbuhan PMKS 7) Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate 8) Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran budaya Ternate 9) Persentase situs budaya yang dilestarikan |
| Tujuan 11: Penegakan Supremasi Hukum, Hak Azasi Manusia, untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Dinamis dan Konstruktif | |
| <p>Sasaran strategis 11: Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1) Jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan 2) Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan 3) Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani |

f. Sasaran Prioritas Program Pembangunan Tahun 2013

Prioritas pembangunan tahun 2013 sesuai RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015, adalah untuk mewujudkan sasaran 6 dan 7, yaitu:

Sasaran 6 : Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

Sasaran 7 : Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional.

g. Indikator Kinerja Utama Tahun 2013

Indikator kinerja utama (IKU) pembangunan Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 adalah indikator kinerja sasaran yang ada dalam RPJMD Pemerintah Kota Ternate tahun 2011-2015, yaitu pada sasaran prioritas pembangunan tahun 2013. Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|----|---|--------------------|
| 1 | Persentase PNS yang memperoleh penghargaan | 6,19 % |
| 2 | Persentase PNS yang diberikan sanksi | 1,03 % |
| 3 | Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan '- Eselon III '- Eselon IV | 20,00 % 30,00 % |
| 4 | Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | 90,00 % |
| 5 | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100,00 % |
| 6 | Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK | 35,00 % |
| 7 | Rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian | 2 Hari |
| 8 | Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha | 10 Kop. |
| 9 | Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang | 26 Kel. |

| | | |
|----|---|---------------------------|
| | diberikan modal usaha | |
| 10 | Nilai modal kerja dan investasi UKM | 785.529.5 Rp 87.031,00 |
| 11 | Nilai omzet UKM | 1,395,892, Rp 295,056 |
| 12 | Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh modal usaha | 10 Klp. |
| 13 | Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan | 5 Klp. |
| 14 | Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan | 34 Klp. |
| 15 | Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan | 4 Klp. |
| 16 | Tingkat pengangguran terbuka | 6.70 % |
| 17 | Pendapatan perkapita | 3,005,770 Rp |
| 18 | Laju pertumbuhan ekonomi | 8,26 % |
| 19 | Tingkat Inflasi | 4,30 % |

B. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2013

Sesuai dengan RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015, maka tahap pembangunan tahun 2013 merupakan tahapan untuk menyambung, melanjutkan dan menajamkan capaian tahun sebelumnya. Pembangunan Kota Ternate tahun 2013 lebih ditegaskan pada komitmen untuk penguatan pada 2 (dua) program sebagai fokus utama pembangunan di tahap III, yaitu:

1. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan kapasitas sumber daya aparatur yang profesional, bersih dan berwibawah, serta birokrasi yang efisien, efektif, kreatif, inovatif dan responsif;
2. Peningkatan ekonomi rakyat, melalui Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perluasan Lapangan Kerja.

Namun demikian, 11 prioritas pembangunan Kota Ternate sesuai RPJMD Kota Ternate tahun 2011-2015 tetap dilaksanakan secara simultan dengan melaksanakan beberapa kegiatan yang dianggap urgen untuk dilaksanakan dan ditetapkan pada

Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2013. Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|----------|
| Sasaran strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan | 1) Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan | 50,00 % |
| | 2) Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih | 80,95 % |
| | 3) Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik | 62,50 % |
| Sasaran strategis 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik | 1) Indeks Pembangunan Manusia | 77,92 % |
| | 2) Angka melek huruf seluruh penduduk | 100,00 % |
| | 3) Angka melek huruf | 100,00 % |
| | 4) Nilai UN dan Uas rata-rata | |
| | - Nilai UN rata-rata SD | 6,00 |
| - Nilai UAS rata-rata SD | 6,00 | |
| - Nilai UN rata-rata SLTP | 5,50 | |
| - Nilai UAS rata-rata SLTP | 6,00 | |
| - Nilai UN rata-rata SLTA | 5,50 | |
| - Nilai UAS rata-rata SLTA | 6,00 | |
| - Nilai UN rata-rata paket A | 6,00 | |
| - Nilai UAS rata-rata paket A | 6,00 | |
| - Nilai UN rata-rata Paket B | 6,00 | |
| - Nilai UAS rata-rata Paket B | 6,50 | |
| - Nilai UN rata-rata paket C | 6,00 | |
| - Nilai UAS rata-rata pakert C | 6,50 | |
| 5) Angka kelulusan: | | |

| | | |
|--|--------|-----------|
| | - SD | 100,00 % |
| | - SLTP | 100,00 % |
| | - SLTA | 100,00 % |
| 6) Angka putus sekolah: | | |
| | - SD | 0,16 % |
| | - SLTP | 0,16 % |
| | - SLTA | 0,17 % |
| 7) Angka rata-rata lama sekolah: | | |
| | - SD | 6 Tahun |
| | - SLTP | 3 Tahun |
| | - SLTA | 3 Tahun |
| 8) Angka partisipasi murni: | | |
| | - SD | 90,50 % |
| | - SLTP | 95,50 % |
| | - SLTA | 90,50 % |
| 9) Angka partisipasi kasar: | | |
| | - SD | 100,50 % |
| | - SLTP | 90,50 % |
| | - SLTA | 90,00 % |
| 10) Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah: | | |
| | - SD | 1 : 164 % |
| | - SLTP | 1 : 289 % |
| | - SLTA | 1 : 367 % |
| 11) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD | | 1 : 32 |
| 12) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP | | 1 : 32 |
| 13) Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA | | 1 : 32 |
| 14) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD | | 1 : 20 |

| | | |
|--|--|---|
| | 15) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP | 1 : 20 |
| | 16) Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA | 1 : 20 |
| Sasaran strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1) Angka usia harapan hidup | 71 Tahun |
| | 2) Angka prevalensi penyakit - Malaria - TBC - DBD - HIV | 20/1.000 Pddk 224/100.000 Pddk 3,8 % 0,89/1.000 Pddk |
| | 3) Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk) - Karena penyakit Malaria - Karena penyakit TBC - Karena penyakit DBD - Karena penyakit HIV | < 2 per 100.000 Pddk < 2 per 100.000 Pddk < 2 per 100.000 Pddk < 15 per 100.000 Pddk |
| | 4) Angka kesembuhan penderita TB paru BTA | 85,00 % |
| | 5) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | 24/1.000 KH |
| | 6) Angka kematian balita | 32/1.000 KH |
| | 7) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | 118/100.000 KH |
| | 8) Persentase balita gizi buruk | < 0,4 % |
| | 9) Rasio dokter spesialis per 100.000 kelahiran hidup | 6 : 100.000 Pddk |
| | 10) Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk | 11 : 100.000 Pddk |
| | 11) Rasio bidan per 100.000 penduduk | 140 : 100.000 Pddk |
| | 12) Rasio perawat per 100.000 penduduk | 100 : 100.000 Pddk |
| | 13) Rasio Posyandu terhadap | 1 : 60 Balita |

| | | |
|---|--|---------------------|
| | balita | |
| | 14) Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 1 : 20.000 Pddk |
| | 15) Rasio Pustu per satuan penduduk | 1 : 14.000 Pddk |
| | 16) Persentase kecamatan bebas rawan gizi | 100,00 % |
| | 17) Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani <24 jam | 100,00 % |
| | 18) Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan Kesehatan | 100,00 % |
| | 19) Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan | 90,00 % |
| | 20) Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk: - <i>Annual Malaria Incidence (AMI)</i> - <i>Annual parasite incidence (API)</i> | < 20 ‰ < 1 ‰ |
| Sasaran strategis 4: Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat | 1) Rasio belanja langsung terhadap total belanja | 49,06 % |
| | 2) Rasio belanja modal terhadap total belanja | 21,45 % |
| | 3) Persentase peningkatan dana partisipatif kecamatan | 7,30 % |
| | 4) Persentase peningkatan dana <i>cost sharing</i> PNPM MP | 6,80 % |
| | 5) Persentase kelurahan yang memiliki satu program unggulan <i>One Village One Program</i> | 30,00 % |

| | | |
|--|--|-----------------------------|
| | 6) Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan - MCK Komunal - Drainase /gorong-gorong - Jalan lingkungan | 12,90 % 4,68 % 7,13 % |
| | 7) Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu | 90,00 % |
| | 8) Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda | 29,41 % |
| | 9) Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikasi tanah | 30 KK |
| Sasaran strategis 5: Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu | 1) Jumlah lokasi di kawasan pasar Gamalama dan Tapak yang ditata | 12 Lok. |
| | 2) Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan | 70,00 % |
| | 3) Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan | 55,83 % |
| | 4) Persentase kecamatan bebas sampah dan banjir | 42,86 % |
| Sasaran strategis 6: Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, | 1) Persentase PNS yang memperoleh penghargaan | 6,19 % |
| | 2) Persentase PNS yang diberikan sanksi | 1,03 % |
| | 3) Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan: - Eselon III - Eselon IV | 20,00 % 30,00 % |

| | | |
|---|--|-----------------------|
| akuntabilitas dan kemandirian masyarakat | 4) Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | 90,00 % |
| | 5) Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100,00 % |
| | 6) Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK | 35,00 % |
| | 7) Rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian | 2 Hari |
| Sasaran strategis 7: Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional | 1) Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha | 10 Kop. |
| | 2) Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha | 26 Klp. |
| | 3) Nilai modal kerja dan investasi UMKM | 785.529.587.031,00 Rp |
| | 4) Nilai Omzet UMKM | 1,395,892,295.056 Rp |
| | 5) Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh modal usaha | 10 Klp. |
| | 6) Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan | 5 Klp. |
| | 7) Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan | 34 Klp. |
| | 8) Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan | 4 Klp. |
| | 9) Tingkat pengangguran terbuka | 6,70 % |
| | 10) Pendapatan perkapita | 3,005,770 Rp |

| | | |
|--|---|-----------|
| | 11) Laju pertumbuhan ekonomi | 8,26 % |
| | 12) Tingkat Inflasi | 4,30 % |
| Sasaran strategis 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas | 1) Jumlah SOP pelayanan publik | 5 SOP |
| | 2) Jumlah layanan perizinan bebas biaya | 8 Jenis |
| | 3) Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai | 10 Tempat |
| | 4) Rasio jumlah penduduk ber-KTP | 0,8:1 |
| | 5) Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran | 50,00 % |
| | 6) Persentase ketersediaan armada sampah (dumptruck) | 76,00 % |
| Sasaran strategis 9: Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir | 1) Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan | 38 Klp. |
| | 2) Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan | 100 Klp. |
| Sasaran strategis 10: Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya | 1) Persentase siswa SD kelas VI beragama islam dapat baca tulis Al-Quran | 100,00 % |
| | 2) Jumlah taman pengajian Al-Quran | 100 TPQ |
| | 3) Jumlah pertemuan forum antar umat beragama | 4 Kali |
| | 4) Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan | 30 Orang |
| | 5) Jumlah regulasi terkait permasalahan penyakit sosial masyarakat | 2 Buah |

| | | |
|---|--|----------|
| | 6) Menurunnya pertumbuhan PMKS | 2,51 % |
| | 7) Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate | 100,00 % |
| | 8) Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran budaya Ternate | 12,00 % |
| | 9) Persentase situs budaya yang dilestarikan | 37,93 % |
| Sasaran strategis 11: Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah | 1) Jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan | 8 Buah |
| | 2) Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan | 100,00 % |
| | 3) Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani | 15 Kasus |

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

a. Penetapan Kategori Nilai Capaian

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Dalam menilai capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

| NO | JUMLAH NILAI | KATEGORI |
|----|-----------------------|-----------------|
| 1. | 85 sampai dengan 100 | Sangat Berhasil |
| 2. | 70 s/d kurang dari 85 | Berhasil |
| 3. | 55 s/d kurang dari 70 | Cukup berhasil |
| 4. | Kurang dari 55 | Tidak berhasil |

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun ketidak-berhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi yang perlu dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Ternate kedepan.

b. Pengukuran Kinerja

1) Evaluasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama tahun 2013

Hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 menggambarkan tingkat kinerja pencapaian sasaran strategis pada Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013. Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 pada formulir pengukuran kinerja terlampir, nilai capaian masing-masing indikator kinerja utama berkisar antara 50,00% sampai dengan 214,29%. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2013 adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--------------------------------|--------|-----------|--------|
| 1 | Persentase PNS yang memperoleh | 6,19 % | 6,80 % | 109,86 |

| | | | | |
|---|--|----------|-----------|--------|
| | penghargaan | | | |
| 2 | Persentase PNS yang diberikan sanksi | 1,03 % | 1,75 % | 59,22 |
| 3 | Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan | | | |
| | - Eselon III | 20,00 % | 42,86 % | 214,29 |
| | - Eselon IV | 30,00 % | 24,23 % | 80,76 |
| 4 | Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | 90,00 % | 98,43 % | 109,37 |
| 5 | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100,00 % | 100,000 % | 100,00 |
| 6 | Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK | 35,00 % | 59,71 % | 170,59 |
| 7 | Rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian | 2 Hari | 2 Hari | 100,00 |
| 8 | Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha | 10 Kop. | 13 Kop | 130,00 |
| 9 | Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha | 26 Klp. | 27 Klp. | 103,85 |

| | | | | |
|----|---|---------------------------|---------------------------|--------|
| 10 | Nilai modal kerja dan investasi UKM | 785.529.587.031,0 0 Rp | 748.123.416.220,0 0 Rp | 95,24 |
| 11 | Nilai omzet UKM | 1.395.892.295.066 Rp | 1.388.947.557.270 Rp. | 99,50 |
| 12 | Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh modal usaha | 10 Klp. | 14 Klp. | 140,00 |
| 13 | Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan | 5 Klp. | 5 Klp. | 100,00 |
| 14 | Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan | 34 Klp. | 28 Klp. | 82,35 |
| 15 | Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan | 4 Klp. | 2 Klp. | 50,00 |
| 16 | Tingkat pengangguran terbuka | 6,70 % | 4,85 % | 127,61 |
| 17 | Pendapatan perkapita | 3.005.770 Rp | 3.250.601 Rp | 108,15 |
| 18 | Laju pertumbuhan ekonomi | 8,26 % | 8,23 % | 99,64 |
| 19 | Tingkat Inflasi | 4,30 % | 9,78 % | 56,03 |

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa dari 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU), 15 (lima belas) mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$, 4 (empat) indikator nilai capainya rendah, yaitu:

1. Persentase PNS yang diberikan sanksi nilai capaian 59,22%.
2. Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan, nilai capaian 82,35%.

3. Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan nilai capaian 50,00%
4. Tingkat Inflasi, nilai capaian 56,03

Analisa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut diatas, diuraikan pada Analisa Capaian Kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menunjukkan keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Ternate tahun 2013.

2) Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2013 dengan realisasinya. Dari hasil pengukuran (Formulir Pengukuran Kinerja terlampir) nilai capaian masing-masing indikator kinerja sasaran berkisar antara 0,00% sampai dengan 1.600,00% yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

| No | Capaian Kinerja Indikator Sasaran | Predikat | Jumlah |
|--------|-----------------------------------|-----------------|--------|
| 1 | 85 sampai dengan 100% | Sangat Berhasil | 80 |
| 2 | 70 s/d kurang dari 85% | Berhasil | 4 |
| 3 | 55 s/d kurang dari 70% | Cukup berhasil | 5 |
| 4 | Kurang dari 55% | Tidak berhasil | 2 |
| Jumlah | | | 91 |

Tingkat pencapaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|----------|-----------|--------|
| Sasaran Strategis 1: Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan | 1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan | 50,00 % | 51,04 % | 102,09 |
| | 2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih | 80,95 % | 80,95 % | 100,00 |
| | 3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN | 62,50 % | 62,50 % | 100,00 |
| Sasaran Strategis 2: Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik | 1 Indeks Pembangunan Manusia | 77,92 % | 77,62 % | 99,61 |
| | 2 Angka melek huruf seluruh penduduk | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| | 3 Angka melek huruf pada usia dewasa | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| | 4 Nilai UN dan UAS rata-rata | | | |
| | - Nilai UN rata-rata SD | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | - Nilai UAS rata-rata SD | 6,00 | 8,00 | 133,33 |
| | - Nilai UN rata-rata SLTP | 5,50 | 5,50 | 100,00 |
| | - Nilai UAS rata-rata SLTP | 6,00 | 8,00 | 133,33 |
| | - Nilai UN rata-rata SLTA | 5,50 | 5,50 | 100,00 |
| | - Nilai UAS rata-rata SLTA | 6,00 | 8,00 | 133,33 |
| | - Nilai UN rata-rata paket A | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | - Nilai UAS rata-rata paket A | 6,00 | 8,00 | 133,33 |
| | - Nilai UN rata-rata paket B | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | - Nilai UAS rata-rata paket B | 6,50 | 8,00 | 123,08 |
| - Nilai UN rata-rata paket C | 6,00 | 6,00 | 100,00 | |
| - Nilai UAS rata-rata paket C | 6,50 | 8,00 | 123,08 | |

| | | | | |
|----|---|-----------|-----------|--------|
| 5 | Angka kelulusan | | | |
| | - SD | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| | - SLTP | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| | - SLTA | 100,00 % | 99,95 % | 99,95 |
| 6 | Angka putus sekolah | | | |
| | - SD | 0,16 % | 0,12 % | 125,00 |
| | - SLTP | 0,16 % | 0,18 % | 87,50 |
| | - SLTA | 0,17 % | 0,21 % | 76,47 |
| 7 | Angka rata-rata lama sekolah | | | |
| | - SD | 6 Thn | 6 Thn | 100,00 |
| | - SLTP | 3 Thn | 3 Thn | 100,00 |
| | - SLTA | 3 Thn | 3 Thn | 100,00 |
| 8 | Angka partisipasi murni | | | |
| | - SD | 90,50 % | 97,31 % | 107,52 |
| | - SLTP | 95,50 % | 86,91 % | 91,01 |
| | - SLTA | 90,50 % | 82,73 % | 91,41 |
| 9 | Angka partisipasi kasar | | | |
| | - SD | 100,50 % | 105,79 % | 105,26 |
| | - SLTP | 90,50 % | 99,79 % | 110,27 |
| | - SLTA | 90,00 % | 94,73 % | 105,26 |
| 10 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah | | | |
| | - SD | 1 : 164 % | 1 : 184 % | 108,93 |
| | - SLTP | 1 : 289 % | 1 : 340 % | 114,61 |
| | - SLTA | 1 : 367 % | 1 : 444 % | 118,03 |
| 11 | Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD | 1 : 32 | 1 : 32 | 100,00 |
| 12 | Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP | 1 : 32 | 1 : 32 | 100,00 |
| 13 | Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA | 1 : 32 | 1 : 32 | 100,00 |
| 14 | Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD | 1 : 20 | 1 : 16 | 95,00 |

| | | | | |
|--|--|----------------------|------------------------|--------|
| | 15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP | 1 : 20 | 1 : 18 | 97,50 |
| | 16 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA | 1 : 20 | 1 : 18 | 97,50 |
| Sasaran Strategis 3: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 Angka usia harapan hidup | 71 Thn | 68,7 Thn | 96,76 |
| | 2 Angka prevalensi penyakit | | | |
| | - Malaria | 20/1000 Pddk | 16/1000 Pddk | 120,00 |
| | - TBC | 224/ 100.000 Pddk | 215/ 100.000 Pddk | 104,02 |
| | - DBD | 3,80 % | 3,40 % | 89,47 |
| | - HIV | 0.89/ 1.000 Pddk | 0.2/ 1.000 Pddk | 177,53 |
| | 3 Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk) | | | |
| | - Karena penyakit Malaria | < 2 per 100.000 Pddk | < 4 per 100.000 Pddk | 50,00 |
| | - Karena penyakit TBC | < 2 per 100.000 Pddk | < 3,4 per 100.000 Pddk | 58,82 |
| | - Karena penyakit DBD | < 2 per 100.000 Pddk | < 2.1 per 100.000 Pddk | 95,24 |
| - Karena penyakit HIV | <15 per 100.000 Pddk | < 3 per 100.000 Pddk | 500,00 | |
| 4 Angka kesembuhan penderita TB paru BTA | 85,00 % | 53,40 % | 62,82 | |
| 5 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | 24/1.000 KH | 5/1.000 KH | 480,00 | |
| 6 Angka kematian balita | 32/1.000 | 2/1.000 | 1.600,00 | |
| 7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | 118/ 100.000 KH | 98/ 100.000 KH | 120,41 | |
| 8 Persentase balita gizi buruk | < 0,4 % | 0,7 % | 57,14 | |
| 9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk | 6:100000 Pddk | 16:100000 Pddk | 266,67 | |
| 10 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk | 11 : 100000 Pddk | 6.5 : 100000 Pddk | 59,09 | |

| | | | | |
|--|---|----------------------|------------------------|--------|
| | 11 Rasio bidan per 100.000 penduduk | 140 : Pddk 100000 | 118,5 : Pddk 100000 | 84,64 |
| | 12 Rasio perawat per 100.000 penduduk | 100 : Pddk 100000 | 230 : Pddk 100000 | 230,00 |
| | 13 Rasio Posyandu terhadap balita | 1 : 60 Balita | 1 : 76 Balita | 88,24 |
| | 14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 1 : 20.000 Pddk | 1 : 21.590 Pddk | 98,05 |
| | 15 Rasio Pustu per satuan penduduk | 1 : 14.000 Pddk | 1 : 15.422 Pddk | 98,11 |
| | 16 Persentase kecamatan bebas rawan gizi | 100,00 % | 83,00 % | 83,00 |
| | 17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| | 18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| | 19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan | 90,00 % | 91,38 % | 101,53 |
| | 20 Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk | | | |
| | - Annual Malaria Incidence (AMI) | 20,00 ‰ | 16,00 ‰ | 125,00 |
| | - Annual Parasite Incidence (API) | 1,00 ‰ | 1,00 ‰ | 100,00 |
| Sasaran Strategis 4: | 1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja | 49,06 % | 47,10 % | 96,01 |
| Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat | 2 Rasio belanja modal terhadap total belanja | 21,45 % | 19,27 % | 89,82 |
| | 3 Persentase peningkatan dana partisipatif kecamatan | 7,30 % | 34,99 % | 479,26 |
| | 4 Persentase peningkatan dana cost sharing PNPM MP | 6,80 % | 62,64 % | 921,14 |

| | | | | | |
|--|---|--|---------|---------|--------|
| | 5 | Persentase kelurahan yang memiliki satu program unggulan One Village One Program | 30,00 % | 75,00 % | 250,00 |
| | 6 | Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan | | | |
| | | - MCK Komunal | 12,90 % | 14,29 % | 110,74 |
| | | - Drainase /gorong-gorong | 4,68 % | 4,41 % | 94,13 |
| | | - Jalan lingkungan | 7,13 % | 15,33 % | 215,05 |
| | 7 | Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu | 90,00 % | - | - |
| | 8 | Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda | 29,41 % | 58,14 % | 197,67 |
| | 9 | Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah | 30 KK | 30 KK | 100,00 |
| Sasaran Strategis 5: Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu | 1 | Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata | 12 Lok. | 11 Lok. | 91,67 |
| | 2 | Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan | 70,00 % | 62,50 % | 89,29 |
| | 3 | Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan | 55,83 % | 60,91 % | 109,10 |
| | 4 | Persentase kecamatan bebas sampah dan banjir | 42,86 % | 42,86 % | 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|--|------------|------------|--------|
| Sasaran Strategis 6: Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat | 1 | Persentase PNS yang memperoleh penghargaan | 6,19 % | 6,80 % | 109,86 |
| | 2 | Persentase PNS yang diberikan sanksi | 1,03 % | 1,75 % | 59,22 |
| | 3 | Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan | | | |
| | | - Eselon III | 20,00 % | 42,86 % | 214,29 |
| | | - Eselon IV | 30,00 % | 24,23 % | 80,76 |
| | 4 | Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | 90,00 % | 98,43 % | 109,37 |
| | 5 | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| | 6 | Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK | 35,00 % | 59,71 % | 170,59 |
| | 7 | Rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian | 2 Hari | 2 Hari | 100,00 |
| Sasaran Strategis 7: Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional. | 1 | Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha | 10 Kop. | 13 Kop. | 130,00 |
| | 2 | Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha | 26 Klp. | 27 Klp. | 103,85 |
| | 3 | Nilai modal kerja dan investasi UKM | 785,5 M Rp | 748.1 M Rp | 95,24 |

| | | | | | |
|--|----|--|---------------|---------------|--------|
| | 4 | Nilai omzet UKM | 1.395. T Rp | 1.389 T Rp | 99,50 |
| | 5 | Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh modal usaha | 10 Klp. | 14 Klp. | 140,00 |
| | 6 | Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan | 5 Klp. | 5 Klp. | 100,00 |
| | 7 | Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan | 34 Klp. | 28 Klp. | 82,35 |
| | 8 | Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan | 4 Klp. | 2 Klp. | 50,00 |
| | 9 | Tingkat pengangguran terbuka | 6,70 % | 4,85 % | 127,61 |
| | 10 | Pendapatan perkapita | 3.005. 770 Rp | 3.250. 601 Rp | 108,15 |
| | 11 | Laju pertumbuhan ekonomi | 8,26 % | 8,23 % | 99,64 |
| | 12 | Tingkat Inflasi | 4,30 % | 9,78 % | 56,03 |
| Sasaran Strategis 8: Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas | 1 | Jumlah SOP pelayanan publik | 5 SOP | 6 SOP | 120,00 |
| | 2 | Jumlah layanan perizinan bebas biaya | 8 jenis | 8 Jenis | 100,00 |
| | 3 | Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai | 10 Tmp | 10 Tmp | 100,00 |
| | 4 | Rasio jumlah penduduk ber-KTP | 0.8:1 | 0.7:1 | 87,50 |
| | 5 | Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 |

| | | | | | |
|--|---|--|----------|----------|--------|
| | 6 | Persentase ketersediaan armada sampah (dumptruck) | 76,00 % | 76,00 % | 100,00 |
| Sasaran Strategis 9: Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir | 1 | Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan | 38 Klp. | 30 Klp. | 78,95 |
| | 2 | Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan | 100 Klp. | 111 Klp. | 111,00 |
| Sasaran Strategis 10: Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya | 1 | Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| | 2 | Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina | 100 TPQ | 100 TPQ | 100,00 |
| | 3 | Jumlah pertemuan forum antar umat beragama | 4 Kali | 4 Kali | 100,00 |
| | 4 | Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan | 30 Org | 46 Org | 153,33 |
| | 5 | Jumlah regulasi terkait permasalahan penyakit sosial masyarakat | 2 Buah | 2 Buah | 100,00 |
| | 6 | Menurunnya pertumbuhan PMKS | 2.51 % | 6.18 % | 246.69 |
| | 7 | Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate | 100.00 % | 98.17 % | 98.17 |
| | 8 | Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran budaya Ternate | 12.00 % | 12.05 % | 100.40 |

| | | | | | |
|---|---|---|----------|----------|--------|
| | 9 | Persentase situs budaya yang dilestarikan | 37.93 % | 37.93 % | 100.00 |
| Sasaran Strategis 11: Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah | 1 | Jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan | 8 bh | 8 bh | 100.00 |
| | 2 | Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 |
| | 3 | Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani | 15 kasus | 14 kasus | 93.33 |

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Formulir Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013, diketahui kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 berada pada kategori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari 11 (sebelas) sasaran tahun 2013, semuanya mencapai hasil optimal $\geq 85\%$. 11 (sebelas) sasaran tersebut mempunyai indikator sasaran sebanyak 91. Hasil pengukuran terhadap capaian indikator kinerja sasaran, menunjukkan bahwa sebanyak 80 (87,91%) indikator sasaran mencapai nilai optimal $\geq 85,00\%$ dan hanya 11 (12,09%) indikator kinerja sasaran yang nilai capaiannya kurang optimal $< 85,00\%$. Realisasi pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

Sasaran 1:

Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan

Pencapaian target sasaran 1 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|---------|-----------|--------|
| 1 | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan | 50,00 % | 51,04 % | 102,09 |
| 2 | Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang | 80,95 % | 80,95 % | 100,00 |

| | | | | |
|------------------|---|---------|---------|--------|
| | terlayani air bersih | | | |
| 3 | Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik | 62,50 % | 62,50 % | 100,00 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 100,70 |

Pada tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa tiga Indikator kinerja sasaran, yaitu: persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan, persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih, dan persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$.

Sasaran 2:

Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik

Pencapaian target sasaran 2 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|------------------------------------|----------|-----------|--------|
| 1 | Indeks Pembangunan Manusia | 77,92 % | 77,62 % | 99,61 |
| 2 | Angka melek huruf seluruh penduduk | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| 3 | Angka melek huruf pada usia dewasa | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| 4 | Nilai UN dan UAS Rata-Rata | | | |
| | - Nilai UN Rata-rata SD | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | - Nilai UAS Rata-Rata SD | 6,00 | 8,00 | 133,33 |
| | - Nilai UN Rata-rata SLTP | 5,50 | 5,50 | 100,00 |
| | - Nilai UAS Rata-Rata SLTP | 6,00 | 8,00 | 133,33 |
| | - Nilai UN Rata-rata SLTA | 5,50 | 5,50 | 100,00 |
| | - Nilai UAS Rata-Rata SLTA | 6,00 | 8,00 | 133,33 |
| | - Nilai UN Rata-Rata Paket A | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | - Nilai UAS Rata-Rata Paket A | 6,00 | 8,00 | 133,33 |
| | - Nilai UN Rata-Rata Paket B | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | - Nilai UAS Rata-Rata Paket B | 6,50 | 8,00 | 123,08 |
| | - Nilai UN Rata-Rata Paket C | 6,00 | 6,00 | 100,00 |
| | - Nilai UAS Rata-Rata Paket C | 6,50 | 8,00 | 123,08 |

| | | | | |
|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 5 | Angka Kelulusan - SD - SLTP - SLTA | 100,00 % 100,00 % 100,00 % | 100,00 % 100,00 % 99,95 % | 100,00 100,00 99,95 |
| 6 | Angka putus sekolah - SD - SLTP - SLTA | 0,16 % 0,16 % 0,17 % | 0,12 % 0,18 % 0,21 % | 125,00 87,50 76,47 |
| 7 | Angka rata-rata lama sekolah - SD - SLTP - SLTA | 6 Tahun 3 Tahun 3 Tahun | 6 Tahun 3 Tahun 3 Tahun | 100,00 100,00 100,00 |
| 8 | Angka partisipasi murni - SD - SLTP - SLTA | 90,50 % 95,50 % 90,50 % | 97,31 % 86,91 % 82,73 % | 107,52 91,01 91,41 |
| 9 | Angka partisipasi kasar - SD - SLTP - SLTA | 100,50 % 90,50 % 90,00 % | 105,79 % 99,79 % 94,73 % | 105,26 110,27 105,26 |
| 10 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah - SD - SLTP - SLTA | 1 : 164 % 1 : 289 % 1 : 367 % | 1 : 184 % 1 : 340 % 1 : 444 % | 108,93 114,61 118,03 |
| 11 | Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD | 1:32 | 1:32 | 100,00 |
| 12 | Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP | 1:32 | 1:32 | 100,00 |
| 13 | Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA | 1:32 | 1:32 | 100,00 |
| 14 | Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD | 1:20 | 1:16 | 95,00 |
| 15 | Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP | 1:20 | 1:18 | 97,50 |
| 16 | Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA | 1:20 | 1:18 | 97,50 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 105,39 |

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa 16 (enam belas) indikator kinerja sasaran telah mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: Indeks Pembangunan Manusia, angka melek huruf seluruh penduduk, angka melek huruf pada usia dewasa, nilai UN dan UAS rata-rata, angka kelulusan, angka putus sekolah, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar, rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD, rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP, rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA, rasio guru terhadap murid pada tingkat SD, rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP dan rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA.

Pada tabel tersebut diatas, juga terlihat bahwa terdapat indikator yang nilai capaiannya sangat tinggi $\geq 110,00\%$, yaitu:

1. Nilai UN dan UAS Rata-rata nilai capaian 114,96%, tingginya nilai capaian tersebut disebabkan oleh:
 - a. Jenjang SD:
 - 1) Guru-guru sudah memenuhi standart
 - 2) Ruang kelas terpenuhi
 - 3) Gedung sekolah sesuai standart sarana prasarana
 - 4) Menjelang ujiang dilaksanakan try out untuk mengevaluasi ESKL terhadap peserta ujian, sehingga dapat menghasilkan nilai yang memuaskan.
 - b. Jenjang SLTP
 - 1) Ruang kelas tingkat SLTP memenuhi standart sarana prasarana
 - 2) Guru pada tingkat SLTP rata-rata S1 dan sebagian S2
 - 3) Sarana prasarana pembelajaran di tingkat SLTP sangat mendukung
 - 4) Menjelang ujiang dilaksanakan try out untuk mengevaluasi ESKL terhadap peserta ujian, sehingga dapat menghasilkan nilai yang memuaskan.
 - c. Jenjang SLTA
 - 1) Guru pada tingkat SLTA rata-rata S1 dan sebagian S2
 - 2) Fasilitas sarana prasarana sangat mendukung, (lab, perpustakaan, buku-buku)
 - 3) Guru-guru pada setiap mata pelajaran selalu mengadakan try out dan les tambahan

2. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, nilai capaian rata-rata 113,86. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan jumlah sekolah negeri pada jenjang SD, SMP dan SMA di Kota Ternate telah cukup memadai dari segi jumlah dan fasilitas sehingga menjadi pilihan utama bagi siswa/siswi dalam melanjutkan pendidikan. Dari segi rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah sesuai SPM Pendidikan, Kota Ternate telah melampaui standar SPM Pendidikan sebagaimana tergambar pada tabel tersebut diatas.

Sasaran 3:

Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat

Pencapaian target sasaran 3 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|-------------------|--------------------|---------|
| 1 | Angka usia harapan hidup | 71 Tahun | 68,7 Tahun | 96,76 |
| 2 | Angka prevalensi penyakit | | | |
| | - Malaria | 20/1.000 Pddk | 16/1.000 Pddk | 120,00 |
| | - TBC | 224/100.000 Pddk | 215/100.000 Pddk | 104,02 |
| | - DBD | 3,8 % | 3,4 % | 89,47 |
| | - HIV | 0,89/1.000 Pddk | 0,2/1.000 Pddk | 177,53 |
| 3 | Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk) | | | |
| | - Karena penyakit Malaria | < 2 per 100.000 | < 4 per 100.000 | 50,00 |
| | - Karena penyakit TBC | < 2 per 100.000 | < 3,4 per 100.000 | 58,82 |
| | - Karena penyakit DBD | < 2 per 100.000 | < 2,1 per 100.000 | 95,24 |
| | - Karena penyakit HIV | < 15 per 100.000 | < 3 per 100.000 | 500,00 |
| 4 | Angka kesembuhan penderita TB paru BTA | 85,00 % | 53,40 % | 62,82 |
| 5 | Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | 24/1.000 KH | 5/1.000 KH | 480,00 |
| 6 | Angka kematian balita | 32/1.000 KH | 2/1.000 KH | 1600,00 |
| 7 | Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup | 118/100.000 KH | 98/100.000 KH | 120,41 |
| 8 | Persentase gizi buruk pada balita | <0,4 % | 0,70 % | 57,14 |
| 9 | Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk | 6 : 100.000 Pddk | 16 : 100.000 Pddk | 266,67 |
| 10 | Rasio dokter gigi per | 11 : 100.000 Pddk | 6,5 : 100.000 Pddk | 59,09 |

| | | | | |
|------------------|--|--------------------|----------------------|--------|
| | 100.000 penduduk | | | |
| 11 | Rasio bidan per 100.000 penduduk | 140 : 100.000 Pddk | 118,5 : 100.000 Pddk | 84,64 |
| 12 | Rasio perawat per 100.000 penduduk | 100 : 100.000 Pddk | 230 : 100.000 Pddk | 230,00 |
| 13 | Rasio Posyandu terhadap balita | 1:60 Balita | 1:76 Balita | 88,24 |
| 14 | Rasio puskesmas per satuan penduduk | 1 : 20.000 Pddk | 1 : 21.590 Pddk | 98,05 |
| 15 | Rasio pustu per satuan penduduk | 1 : 14.000 Pddk | 1 : 15.422 Pddk | 98,11 |
| 16 | Persentase kecamatan bebas rawan gizi | 100,00 % | 83,00 % | 83,00 |
| 17 | Persentase kelurahan terkena KLB yang di tangani < 24 jam | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| 18 | Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| 19 | Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan | 90,00 % | 91,38 % | 101,53 |
| 20 | Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk: | | | |
| | - <i>Annual Malaria Incidence</i> (AMI) | 20,00 ‰ | 16,00 ‰ | 125,00 |
| | - <i>Annual parasite incidence</i> (API) | 1,00 ‰ | 1,00 ‰ | 100,00 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 190,61 |

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 20 (dua puluh) indikator kinerja sasaran, sebanyak 15 (lima belas) indikator sasaran mencapai nilai optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: angka usia harapan hidup, angka prevalensi penyakit Malaria, TBC, DBD dan HIV, angka kematian kasar (per 1.000 penduduk) karena penyakit Malaria, penyakit TBC, penyakit DBD dan penyakit HIV, angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, angka kematian balita, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk, rasio perawat per 100.000 penduduk, rasio Posyandu terhadap balita, rasio Puskesmas per satuan penduduk, rasio Pustu per satuan penduduk, persentase kelurahan terkena KLB

yang di tangani < 24 jam, persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan, persentase persalinan oleh tenaga kesehatan dan rasio penderita Malaria terhadap jumlah penduduk. Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat indikator sasaran yang nila capaiannya sangat tinggi $\geq 110,00\%$, yaitu :

- 1) Angka prevalensi penyakit Malaria, TBC, DBD dan HIV, nilai capaian rata-rata 122,76%. Tingginya nilai capaian tersebut secara umum dapat dijelaskan bahwa telah berjalannya koordinasi LS terkait pengendalian dan penanggulangan Malaria, TBC, DBD dan HIV, berdampak pada meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang bahaya penyakit tersebut, sehingga menumbuhkan gerakan masyarakat terkait sistem kewaspadaan dini dalam penanggulangan penyakit dimaksud.
- 2) Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk) karena penyakit Malaria, penyakit TBC, penyakit DBD dan penyakit HIV, nilai capaian rata-rata 176,027%. Tingginya nilai capaian tersebut karena adanya upaya yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penyakit Malaria

Telah dibuat rencana kerja tahunan program P2 Malaria tingkat puskesmas, dibuat laporan P2 Malaria dan integrasi (Imunisasi dan KIA) tiap bulan, penyediaan obat, pengamatan jentik di lokasi breeding places yang berada diwilayah kerja Puskesmas, pengawasan dalam penyemprotan rumah (IRS), distribusi Kelambu (Imunisasi lengkap dan K1), sosialisasi/penyuluhan, MBS (Mass Blood Survey) serta dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

- 2) TBC

Telah dilakukan promosi aktif lintas program, penjarangan suspek, pemeriksaan kontak BTA positif, pelacakan pasien putus berobat, dan pelacakan pemeriksaan dahak juga pemahaman masyarakat tentang penyakit TB sudah baik.

- 3) DBD

Telah dilakukan promosi aktif lintas program, penyelidikan Epidemiologi, kegiatan Survey Jentik, abatesasi, fogging Focus dan pemahaman masyarakat tentang penyakit DBD sudah baik dan kegiatan pemberantasan sarang Nyamuk

4) HIV

Dilakukan sosialisasi tentang HIV-AIDS dan Napza pada kelompok remaja dan kelompok resiko tinggi, dilakukan Konseling IMS dan HIV-AIDS pada saat kegiatan mobile dan kunjungan ke sarana layanan, pengambilan sampel secret dan sampel darah yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan pada populasi kunci, pemeriksaan CD4 (sel dalam system kekebalan tubuh yang melawan infeksi), dilakukan monitoring efek samping obat (cara terbaik untuk mengetahui keberhasilan pengobatan dan efek yang timbul selama masa pengobatan), Monitoring dan Evaluasi yang dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, pertemuan Internal layanan dalam membahas isu atau masalah yang ada pada layanan, supervisi layanan. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan tidak lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, sumber daya dan anggaran (APBD dan GF-ATM) serta kerjasama dengan LSM dan Ormas Fatahayat NU sebagai kelompok penjangkau. Sarana prasarana yang disediakan meliputi :

- ✓ **Klinik IMS Jelita** terletak di Puskesmas Perawatan Siko, dengan sumber daya yang telah dilatih (TOT), Laboratorium sederhana untuk pemeriksaan sampel secret;
- ✓ **Klinik IMS Sakura** terletak di Puskesmas Kalumata, dengan sumber daya yang telah di TOT, Laboratorium sederhana untuk pemeriksaaan sampel secret;
- ✓ **Klinik Jasmine** melayani konseling, pemeriksaan dan pengobatan HIV-AIDS yang terletak di RSUD Chasan Boesoerie Ternate. Dengan Sumber Daya yang telah terlatih dan Sarana Laboratorium yang lengkap.

3) Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup nilai capaian 480,00, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya upaya yang dilakukan dengan memberikan makanan tambahan (PMT) pada Bumil KEK, meningkatkan kunjungan rumah untuk melakukan kunjungan Neonatal, meningkatkan penyuluhan berbasis masyarakat (TOMA, TOGA), melakukan penyuluhan tanda bahaya pada bayi serta melakukan manajemen terpadu pada bayi muda untuk skrening bayi dengan faktor resiko.

4) Angka kematian balita nilai capaian 1600,00. Tingginya nilai capaian tersebut karena adanya upaya dari Dinas Kesehatan Kota Ternate untuk menurunkan

kematian balita dengan menerapkan Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS) di Puskesmas sesuai standar, Penanganan Balita Gizi Buruk dan Gizi Kurang di Puskesmas dan Posyandu serta penanganan rujukan bila diperlukan.

- 5) Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, nilai capaian 120,41%. Tingginya capaian tersebut disebabkan adanya upaya yang dilakukan yaitu melakukan sosialisasi dengan sasaran ibu hamil dan bersalin, pelacakan kasus resiko tinggi pada ibu hamil, dan adanya penyuluhan tentang tanda bahaya pada ibu hamil, serta telah meningkatnya pengetahuan bidan tentang PPGDON.
- 6) Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk, nilai capaian 266,67%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan dokter ahli yang melayani masyarakat Ternate sudah cukup banyak. Sesuai SDM maka dokter spesialis yang seharusnya ada sebanyak 13 dokter namun tahun 2013 jumlah dokter spesialis di Kota Ternate sebanyak 32 orang.
- 7) Rasio perawat per 100.000 penduduk, nilai capaian 230,00. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan jumlah tenaga perawat di Kota Ternate pada tahun 2013 berjumlah 460 orang. Kondisi ideal sesuai SPM kesehatan seharusnya jumlah tenaga perawat di Kota Ternate sesuai rasio jumlah penduduk seharusnya 200 orang sehingga terjadi kelebihan sebanyak 260 orang perawat. Kelebihan tersebut terdistribusi pada rumah sakit dan klinik kesehatan swasta.
- 8) Rasio penderita Malaria terhadap jumlah penduduk, nilai capaian rata-rata 112,50%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan telah optimalnya koordinasi LS terkait dalam pengendalian dan penanggulangan Malaria, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melindungi diri dari kontak nyamuk, meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang PHBS, gerakan PSN, optimalnya penyuluhan, meningkatnya kesadaran penggunaan kelambu, meningkatnya sistem kewaspadaan dini dan pemantauan wilayah setempat, meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kepatuhan minum obat.

Dari tabel tersebut diatas juga terlihat bahwa terdapat 5 (lima) indikator sasaran yang nilai capaiannya rendah, yaitu:

1. Angka kesembuhan penderita TB paru dan BTA, nilai capaian 62,82%. Rendahnya nilai capaian disebabkan adanya kasus di RS Chasan Boesorie yang tidak dilakukan pemeriksaan dahak di akhir pengobatan dan angka kematian masih tinggi dikarenakan adanya penyakit penyerta seperti Diabetes Melitus, Jantung, dll.
2. Persentase gizi buruk pada balita nilai capaian 57,14%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan masih tingginya kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan. Pada tahun 2013 prevalensi gizi buruk 0,7%, yaitu dari 8.848 anak yang ditangani, ditemukan 60 kasus gizi buruk yang ditemukan. Tingginya kasus gizi buruk tersebut disebabkan:
 - a. Kegiatan Promotif belum berjalan dengan maksimal (pemantauan pertumbuhan, konseling ASI /MP-ASI).
 - b. Adanya penyakit penyerta (TB, Pnemonia, Malaria).
 - c. Faktor Ekonomi (masi kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga).
3. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk, nilai capaian 59,09%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan jumlah dokter gigi yang melayani kesehatan gigi di Kota Ternate jumlahnya masih minim, yaitu jumlah dokter gigi yang ada di Kota Ternate hanya berjumlah 13 orang, kondisi ideal seharusnya 22 orang dokter.
4. Rasio bidan per 100.000 penduduk, nilai capaian 84,64%. Rendahnya nilai capaiannya tersebut disebabkan jumlah bidan yang berada di Kota Ternate hanya sebanyak 237 orang kondisi ideal sesuai SPM seharusnya 280 orang sehingga masih kekurangan sebanyak 43 orang.
5. Persentase kecamatan bebas rawan gizi, nilai capain 83,00%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan juga faktor ekonomi, yaitu kurang tersedianya pangan yang cukup untuk kebutuhan keluarga.

Sasaran 4:

Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat

Pencapaian target sasaran 4 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|------------------|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1 | Rasio belanja langsung terhadap total belanja | 49,06 % | 47,10 % | 96,01 |
| 2 | Rasio belanja modal terhadap total belanja | 21,45 % | 19,27 % | 89,82 |
| 3 | Persentase peningkatan dana partisipatif kecamatan | 7,30 % | 34,99 % | 479,32 |
| 4 | Persentase peningkatan dana cost sharing PNPM MP | 6,80 % | 62,64 % | 921,18 |
| 5 | Persentase kelurahan yang memiliki satu program unggulan <i>One Village One Program</i> | 30,00 % | 75,00 % | 250,00 |
| 6 | Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan: - MCK Komunal - Drainase /gorong-gorong - Jalan lingkungan | 12,90 % 4,68 % 7,13 % | 14,29 % 4,41 % 15,33 % | 110,74 94,13 215,05 |
| 7 | Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu | 90,00 % | - | - |
| 8 | Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda | 29,41 % | 58,14 % | 197,67 |
| 9 | Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah | 30 KK | 30 KK | 100,00 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 232,17 |

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa dari 9 (sembilan) indikator sasaran, 8 (delapan) indikator sasaran mencapai target optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: rasio belanja langsung terhadap total belanja, rasio belanja modal terhadap total belanja, persentase peningkatan dana partisipatif kecamatan, persentase peningkatan dana cost sharing PNPM MP, persentase peningkatan infrastruktur lingkungan, persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu, persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda, jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah. Dari 8 (delapan)

indikator sasaran yang mencapai hasil optimal tersebut, 5 (lima) indikator sasaran mencapai nilai $\geq 110,00\%$, yaitu :

1. Persentase peningkatan dana partisipatif kecamatan, nilai capaian 479,32%, disebabkan adanya komitmen yang kuat dari Walikota Ternate untuk menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat melalui peningkatan dana partisipatif sebagai perangsang/stimulus partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan.
2. Persentase peningkatan dana *cost sharing* PNPM MP, nilai capaian 921.18%, disebabkan adanya upaya untuk mendapatkan alokasi dana PNPM MP yang lebih besar dari tahun sebelumnya untuk merealisasikan usulan-usulan program/kegiatan dari kelurahan yang belum terakomodir dalam APBD Kota Ternate tahun 2013.
3. Persentase kelurahan yang memiliki satu program unggulan *One Village One Program*, nilai capaian 250,00%, disebabkan pada tahun 2013 Pemerintah Kota Ternate mengalokasikan Dana Pembangunan Kelurahan (DPK) khusus untuk membiayai program unggulan pada 13 Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kota Ternate Tahun 2013.
4. Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan, nilai capaian 139,97%, disebabkan adanya peningkatan alokasi dana dalam membiayai perbaikan infrastruktur lingkungan tahun 2013 pada pembangunan jalan lingkungan, sehingga volume pekerjaan meningkat.
5. Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda, nilai capaian 197,67%, disebabkan adanya peningkatan yang signifikan terhadap pemberian bantuan pada generasi muda, dimana sesuai rencana sebanyak 10 kelompok karang taruna yang diberikan bantuan terealisasi sebanyak 25 karang taruna.

Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa terdapat 1 (satu) Indikator sasaran yang nilai capaiannya 0%, yaitu persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu, hal tersebut disebabkan pada tahun anggaran 2013 ketersediaan dana untuk melaksanakan program Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 sangat terbatas/defisit sehingga program pemberian bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Sasaran 5:

Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu

Pencapaian target sasaran 5 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 1 | Jumlah lokasi di kawasan pasar Gamalama dan Tapak yang ditata | 12 lokasi | 11 lokasi | 91,67 |
| 2 | Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan | 70,00 % | 62,50 % | 89,29 |
| 3 | Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan | 55,83 % | 60,91 % | 109,10 |
| 4 | Persentase kecamatan bebas sampah dan banjir | 42,86 % | 42,86 % | 100,00 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 97,51 |

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa 4 (empat) indikator kinerja sasaran semuanya telah mencapai target $\geq 85,00\%$, yaitu: jumlah lokasi di kawasan pasar Gamalama dan Tapak yang ditata, persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan, rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan dan persentase kecamatan bebas sampah dan banjir.

Sasaran 6:

Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat

Pencapaian target sasaran 6 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|--|--------|-----------|--------|
| 1 | Persentase PNS yang memperoleh penghargaan | 6,19 % | 6,80 % | 109,86 |
| 2 | Persentase PNS yang diberikan sanksi | 1,03 % | 1,75 % | 59,22 |

| | | | | |
|------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 3 | Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan: - Eselon III - Eselon IV | 20,00 % 30,00 % | 42,86 % 24,23 % | 214,29 80,76 |
| 4 | Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | 90,00 % | 98,43 % | 109,37 |
| 5 | Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| 6 | Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK | 35,00 % | 59,71 | 170,59 |
| 7 | Rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian | 2 Hari | 2 Hari | 100,00 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 118,01 |

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran yang ditetapkan, sebanyak 6 (enam) indikator sasaran mencapai hasil optimal $\geq 85,00\%$, yaitu: persentase PNS yang memperoleh penghargaan, persentase pejabat struktural eselon III dan eselon IV yang telah mengikuti diklat kepemimpinan, persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan, persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu, rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK, dan rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang nilai capaiannya tinggi, yaitu persentase pejabat struktural eselon III dan eselon IV yang telah mengikuti diklat kepemimpinan dengan nilai capaian 147,52%. Hal tersebut disebabkan pada tahun 2013 dilakukan pendidikan dan pelatihan PIM IV yang diikuti oleh 40 orang pejabat struktural eselon IV dilingkungan Pemerintah Kota Ternate dan PIM III sebanyak 4 orang, juga terdapat pejabat struktural eselon III dan IV yang diangkat dalam jabatan di tahun 2013 telah mengikuti Diklat PIM IV dan Diklat PIM III sebelumnya.

Namun terdapat 1 (satu) indikator sasaran nilai capaiannya tidak optimal, yaitu persentase PNS yang diberikan sanksi nilai capaian 59,22%, hal tersebut disebabkan adanya komitmen yang kuat dari Walikota Ternate untuk memberikan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga pada tahun 2013 terdapat 103 PNS yang diberi sanksi.

Sasaran 7:

Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional

Pencapaian target sasaran 7 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|----|---|-----------------------|-----------------------|--------|
| 1 | Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha | 10 Klp. | 13 Klp. | 130,00 |
| 2 | Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha | 26 Klp. | 27 Klp. | 103,85 |
| 3 | Nilai modal kerja dan investasi UKM | 785.529.587.031,00 Rp | 748.123.416.220,00 Rp | 95,24 |
| 4 | Nilai Omzet UMKM | 1.395.892.295.056 Rp | 1.388.947.557.270 Rp | 99,50 |
| 5 | Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh bantuan modal usaha | 10 Klp. | 14 Klp. | 140,00 |
| 6 | Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan | 5 Klp. | 5 Klp. | 100,00 |
| 7 | Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan | 34 Klp. | 28 Klp. | 82,35 |
| 8 | Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan | 4 Klp. | 2 Klp. | 50,00 |
| 9 | Tingkat pengangguran terbuka | 6,70 % | 4,85 % | 127,61 |
| 10 | Pendapatan perkapita | 3.005.770 Rp | 3.250.601 Rp | 108,15 |
| 11 | Laju pertumbuhan | 8,26 % | 8,23 % | 99,64 |

| | | | | |
|------------------|-----------------|--------|--------|-------|
| | ekonomi | | | |
| 12 | Tingkat Inflasi | 4,30 % | 9,78 % | 56,03 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 99,36 |

Pada tabel tersebut, terlihat bahwa sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja sasaran semuanya mencapai target optimal di atas 85 %, yaitu: jumlah koperasi aktif, jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha, nilai modal kerja dan investasi UKM, nilai Omzet UMKM, jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh bantuan modal usaha, jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan, tingkat pengangguran terbuka, pendapatan perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi. Pada indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator yang nilai capainya sangat tinggi, yaitu:

1. Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha nilai capaian 130,00%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah koperasi yang diberikan bantuan modal usaha tahun 2013, yaitu dari target sebanyak 10 koperasi terealisasi sebanyak 13 koperasi.
2. Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh bantuan modal usaha nilai capaian 140,00%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh bantuan modal usaha di tahun 2013 yaitu dari target 10 kelompok terealisasi 14 kelompok.

Pada tabel tersebut terlihat 2 (dua) indikator sasaran yang nilai capainya rendah, yaitu:

1. Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan, nilai capaian 50,00%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan rendahnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan kontribusi pada pencapaian target indikator sasaran tersebut.
2. Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan, nilai capaian 82,35%. Rendahnya nilai capaian disebabkan rendahnya alokasi anggaran sehingga sesuai target sebanyak 34 kelompok yang dapat diberikan bantuan hanya sebanyak 28 kelompok.

3. Tingkat Inflasi, nilai capaian 56,03%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan adanya peralihan musim yang menyebabkan naiknya tinggi gelombang diperairan Maluku Utara yang mempengaruhi laju distribusi serta kapasitas produksi sektor perikanan dan juga faktor komoditas yang berasal dari kelompok komoditas bergejolak (*volatile foods*) yang merupakan komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu.

Sasaran 8:

Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas

Pencapaian target sasaran 8 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|------------------|--|-----------|-----------|--------|
| 1 | Jumlah SOP pelayanan publik | 5 SOP | 6 SOP | 120,00 |
| 2 | Jumlah layanan perizinan bebas biaya | 8 Jenis | 8 Jenis | 100,00 |
| 3 | Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai | 10 Tempat | 10 Tempat | 100,00 |
| 4 | Rasio jumlah penduduk ber-KTP | 0,8:1 | 0,7 :1 | 87,50 |
| 5 | Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran | 50,00 % | 50,00 % | 100,00 |
| 6 | Persentase ketersediaan armada sampah (<i>dumptruck</i>) | 76,00 % | 76,00 % | 100,00 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 101,25 |

Dari tabel tersebut diatas, terlihat bahwa dari 6 (enam) indikator sasaran, seluruhnya mencapai hasil optimal, yaitu: jumlah SOP pelayanan publik, jumlah layanan perizinan bebas biaya, jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai, rasio penduduk ber-KTP, persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran, dan persentase ketersediaan armada

sampah (*dumpruck*). Pada tabel tersebut terlihat 1 (indikator) sasaran yang nilai capaiannya sangat tinggi yaitu Jumlah SOP pelayanan publik dengan nilai capaian 120,00%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya komitmen dari Walikota Ternate untuk meningkatkan pelayanan publik sehingga ditempuh kebijakan untuk mengoptimalkan pelayanan publik dengan menerbitkan Peraturan Walikota Ternate Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Kota Ternate Tahun 2013, salah satu fokus kegiatan adalah membuat SOP pada kegiatan pelayanan publik yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilingkungan Pemerintah Kota Ternate.

Sasaran 9:
Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir

Pencapaian target sasaran 9 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|------------------|--|----------|-----------|--------|
| 1 | Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan | 38 Klp. | 30 Klp. | 78,95 |
| 2 | Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan | 100 Klp. | 111 Klp. | 111,00 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 94,97 |

Pencapaian kinerja pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa 1 (satu) indikator sasaran telah mencapai hasil optimal, yaitu persentase kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan dengan nilai capaian 111,00%. Tingginya nilai capaian tersebut disebabkan adanya pemberian bantuan terhadap kelompok masyarakat kawasan pesisir yang mengelola hasil perikanan di tahun 2013 yaitu dari rencana sebanyak 100 kelompok terealisasi sebanyak 111 kelompok, namun terdapat 1 (satu) indikator sasaran yang nilai capaian rendah yaitu jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan minimnya alokasi

anggaran yang diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan kontribusi pada pencapaian target indikator sasaran tersebut.

Sasaran 10:

Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya

Pencapaian target sasaran 10 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|------------------|---|----------|-----------|--------|
| 1 | Persentase siswa SD kelas VI beragama islam dapat baca tulis Al-Quran | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| 2 | Jumlah taman pengajian Al-Quran | 100 TPQ | 100 TPQ | 100,00 |
| 3 | Jumlah pertemuan forum antar umat beragama | 4 Kali | 4 Kali | 100,00 |
| 4 | Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan | 30 Orang | 46 Orang | 153,33 |
| 5 | Jumlah regulasi terkait permasalahan penyakit sosial masyarakat | 2 Buah | 2 Buah | 100,00 |
| 6 | Menurunnya pertumbuhan PMKS | 2,51 % | 6,18 % | 246,64 |
| 7 | Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate | 100,00 % | 98,17 % | 98,17 |
| 8 | Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran budaya Ternate | 12,00 % | 12,05 % | 100,40 |
| 9 | Persentase situs budaya yang dilestarikan | 37,93 % | 37,93 % | 100,00 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 122,06 |

Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 9 (sembilan) indikator sasaran, semuanya mencapai nilai optimal, yaitu: persentase siswa SD kelas VI beragama islam dapat baca tulis Al-Quran, jumlah taman pengajian Al-Quran, jumlah pertemuan forum antar umat beragama, rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan, jumlah regulasi terkait permasalahan penyakit sosial

masyarakat, menurunnya pertumbuhan PMKS, persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate, persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran budaya Ternate, dan persentase situs budaya yang dilestarikan. Pada indikator tersebut terdapat 2 (dua) indikator sasaran yang nilai capaiannya sangat tinggi, yaitu:

1. Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan, nilai capaian 153,33%, hal tersebut disebabkan kegiatan razia PSK selama tahun 2013 hanya dilakukan sebanyak 7 kali, hal tersebut membuka potensi tumbuhnya PSK di Kota Ternate sehingga pada saat dilakukan razia jumlah PSK yang terjaring meningkat, yaitu dari target rata-rata sebanyak 30 orang realisasinya 46 orang
2. Menurunnya pertumbuhan PMKS, nilai capaian 246,64%, disebabkan pada tahun 2013 dilakukan pembangunan rumah layak huni sebanyak 107 rumah sehingga data PMKS sebanyak 497 berkurang menjadi 390 PMKS.

Sasaran 11:

Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah

Pencapaian target sasaran 11 tersebut adalah sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % |
|------------------|---|----------|-----------|--------|
| 1 | Jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan | 8 Buah | 8 Buah | 100,00 |
| 2 | Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 |
| 3 | Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani | 15 Kasus | 14 Kasus | 93,33 |
| JUMLAH RATA-RATA | | | | 97,78 |

Pada tabel tersebut terlihat bahwa 3 (tiga) indikator kinerja sasaran telah mencapai hasil optimal di atas 85%, yaitu: jumlah Peraturan Daerah yang diterbitkan, persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan, dan jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani.

C. ANALISA TREND CAPAIAN KINERJA

Analisa *trend* capaian kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2012 adalah sebagai berikut :

| NO | SASARAN | CAPAIAN TAHUN 2012 | CAPAIAN TAHUN 2013 | KETERANGAN |
|----|--|--------------------|--------------------|------------|
| 1 | Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan | 91,02% | 100,70% | 9,68% |
| 2 | Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik | 109,82% | 105,39% | (4,43%) |
| | Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 104,14% | 190,61% | 86,47% |
| 4 | Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat | 100,00% | 232,17% | 132,17% |
| 5 | Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu | 99,81% | 97,51% | (2,30%) |
| 6 | Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan | 99,37% | 118,01% | 18,64% |

| | | | | |
|------------------|---|---------|---------|---------|
| | kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat | | | |
| 7 | Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional. | 103,41% | 99,36% | (4,05%) |
| 8 | Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas | 96,35% | 101,25% | 4,90% |
| 9 | Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir | 99,67% | 94,97% | (4,70%) |
| 10 | Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya | 100,71% | 122,06% | 21,35% |
| 11 | Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah | 87,50% | 97,78% | 10,28% |
| JUMLAH RATA-RATA | | 99,25% | 123,61% | 24,36% |

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja pencapaian sasaran tahun 2013 dibanding tahun 2012 terjadi peningkatan, yaitu dari 11 (sebelas) sasaran, 7 (tujuh) sasaran mengalami peningkatan dan 4 (empat) sasaran mengalami penurunan nilai capaian. 7 (tujuh) capaian kinerja sasaran yang meningkat tersebut adalah:

1. Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan dengan nilai capaian 100,70%, capaian tahun 2012 sebesar 91,02%, terjadi kenaikan sebesar 9,68%;
 2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan nilai capaian 190,61%, capaian tahun 2012 sebesar 104,14, terjadi kenaikan sebesar 86,47%;
 3. Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat dengan nilai capaian 232,17%, capaian tahun 2012 sebesar 100%, terjadi kenaikan 132,17%;
 4. Terwujudnya good government, dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat dengan nilai capaian 118,01%, capaian tahun 2012 sebesar 99,37%, terjadi kenaikan sebesar 18,64%;
 5. Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas dengan nilai capaian 101,25, tahun 2012 sebesar 96,35%, terjadi kenaikan 4,90%;
 6. Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya dengan nilai capaian 122,06%, tahun 2012 nilai capaian sebesar 100,71%, terjadi kenaikan sebesar 21,35%;
 7. Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah dengan nilai capaian 97,78%, tahun 2012 nilai capaian 87,50%, terjadi kenaikan sebesar 10,28%.
- 4 (empat) sasaran yang nilai capaiannya menurun, yaitu:
1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik dengan nilai capaian 105,39%, tahun 2012 nilai capaian 109,82, terjadi penurunan sebesar 4,43%;

2. Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu dengan nilai capaian 97,51%, tahun 2012 nilai capaian 99,81%, terjadi penurunan sebesar 2,30%;
3. Meningkatnya kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional dengan nilai capaian 99,36%, tahun 2012 nilai capaian 103,41%, terjadi penurunan sebesar 4,05%;
4. Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir, nilai capaian 94,97%, tahun 2012 nilai capaian 99,67%, terjadi penurunan sebesar 4,70%.

Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran tahun 2013 sebesar 123,61%, kinerja pencapaian indikator sasaran tahun 2012 sebesar 99,25%, dengan demikian terjadi peningkatan kinerja pencapaian indikator sasaran tahun 2013 sebesar 24,36 %.

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Garis besar APBD Kota Ternate tahun 2013 dan realisasinya adalah sebagai berikut:

| No. Urut | Uraian | Anggaran Perubahan | Realisasi | Sisa | % |
|----------|--|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4 | 6 |
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | | | | |
| 1.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH | 43.535.000.000,00 | 40.572.818.002,00 | (2.962.181.998,00) | 93,20 |
| 1.1.1 | Pendapatan Pajak Daerah | 20.500.000.000,00 | 21.586.741.654,00 | 1.086.741.654,00 | 105,30 |
| 1.1.2 | Pendapatan Retribusi Daerah | 15.671.000.000,00 | 12.765.797.677,00 | (2.905.202.323,00) | 81,46 |
| 1.1.3 | Hasi pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan | 500.000.000,00 | 365.392.583,00 | (134.607.417,00) | 73,08 |
| 1.1.4 | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | 6.864.000.000,00 | 5.854.886.088,00 | (1.009.113.912,00) | 85,30 |
| 1.2 | PENDAPATAN TRANSFER | 547.345.576.000,00 | 548.427.292.935,00 | (1.081.716.935,00) | 100,20 |
| 1.2.1 | Dana Bagi Hasil Pajak | 33.500.000.000,00 | 29.628.043.318,00 | (3.871.956.682,00) | 88,44 |
| 1.2.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak | 6.772.000.000,00 | 11.725.673.617,00 | 4.953.673.617,00 | 173,15 |
| 1.2.3 | Dana Alokasi Umum | 462.645.746.000,00 | 462.645.746.000,00 | - | 100,00 |
| 1.2.4 | Dana Alokasi Khusus | 44.427.830.000,00 | 44.427.830.000,00 | - | 100,00 |
| 1.3 | LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH | 57.332.791.000,00 | 57.699.970.178,00 | (367.179.178,00) | 100,64 |
| 1.3.1 | Hibah | 260.000.000,00 | - | (260.000.000,00) | - |
| 1.3.2 | Dana Darurat | | | - | |

| | | | | | |
|------------|--|----------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|
| 1.3.3 | Dana Bagi Hsl Pajak Provinsi & Pemda lainnya | 7.350.000.000,00 | 6.340.685.608,00 | 1.009.314.392,00 | |
| 1.3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus | 49.722.791.000,00 | 51.240.275.000,00 | (1.517.484.000,00) | 103,05 |
| 1.3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi / Pemda Lainnya | | - | - | - |
| 1.3.6 | Pendapatan lainnya | | 119.009.570,00 | (119.009.570,00) | |
| | | | | | |
| | Jumlah Pendapatan | 648.213.367.000,00 | 646.700.081.115,00 | 1.513.285.885,00 | 99,77 |
| | | | | | |
| 2 | BELANJA DAERAH | | | | |
| 2.1 | BELANJA TIDAK LANGSUNG | 354.213.142.502,00 | 341.028.043.326,00 | 13.185.099.176,00 | 96,28 |
| 2.1.1 | Belanja Pegawai | 336.258.336.002,00 | 328.503.468.686,00 | 7.754.867.316,00 | 97,69 |
| 2.1.2 | Belanja Bunga | 333.000.000,00 | 218.856.504,00 | 114.143.496,00 | |
| 2.1.3 | Belanja Subsidi | | | - | |
| 2.1.4 | Belanja Hibah | 4.882.806.500,00 | 4.739.102.000,00 | 143.704.500,00 | 97,06 |
| 2.1.5 | Belanja Bantuan Sosial | 5.200.500.000,00 | 1.922.121.596,00 | 3.278.378.404,00 | 36,96 |
| 2.1.6 | Belanja Bagi Hasil Kpd Prov/kab/Kota dan Desa | | | - | |
| 2.1.7 | Belanja Bantuan Keuangan Kpd Prov/kab/kota dan Des | 538.500.000,00 | 520.739.120,00 | 17.760.880,00 | |
| 2.1.8 | Belanja Tidak Terduga | 7.000.000.000,00 | 5.123.755.420,00 | 1.876.244.580,00 | 73,20 |
| 2.1.9 | Lain-Lain | | | | |
| | | | | | |
| 2.2 | BELANJA LANGSUNG | 326.029.711.373,00 | 303.483.287.987,00 | 22.546.423.386,00 | 93,08 |
| 2.2.1 | Belanja Pegawai | 54.121.718.800,00 | 50.902.298.540,00 | 3.219.420.260,00 | 94,05 |
| 2.2.2 | Belanja Barang dan Jasa | 136.134.089.609,00 | 125.498.895.812,00 | 10.635.193.797,00 | 92,19 |
| 2.2.3 | Belanja Modal | 135.773.902.964,00 | 127.082.093.635,00 | 8.691.809.329,00 | 93,60 |
| | Jumlah Belanja | 680.242.853.875,00 | 644.511.331.313,00 | 35.731.522.562,00 | 94,75 |
| | | | | | |
| | Surplus / (Defisit) | (32.029.486.875,00) | 2.188.749.802,00 | | |
| | | | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1 | PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.1.1 | SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya | - | (14.416.677.770,00) | 14.416.677.770,00 | - |
| 3.1.2 | Pencairan Dana Cadangan | | | | |
| 3.1.3 | Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yg dipisahkan | | | | |
| 3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah | 37.779.486.875,00 | - | 37.779.486.875,00 | - |

| | | | | | |
|-------|---------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| 3.1.5 | Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman | | | | |
| 3.1.6 | Penerimaan Piutang Daerah | | | | |
| | Jumlah Penerimaan Pembiayaan | 37.779.486.875,00 | (14.416.677.770,00) | 52.196.164.645,00 | - |
| | | | | | |
| 3.2 | PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH | | | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal (Investasi) Daerah | 5.750.000.000,00 | 5.579.600.000,00 | 170.400.000,00 | 97,04 |
| 3.2.3 | Pembayaran Pokok Hutang | | - | | |
| 3.2.4 | Pemberian Pinjaman Daerah | | | | |
| | Jumlah Pengeluaran Pembiayaan | 5.750.000.000,00 | 5.579.600.000,00 | 170.400.000,00 | 97,04 |
| | | | | | |
| | Pembiayaan Netto | 32.029.486.875,00 | (19.996.277.770,00) | 52.025.764.645,00 | (62,43) |
| | | | | | |
| | SILPA Tahun Berkenaan | - | (17.807.527.968,00) | 17.807.527.968,00 | - |

Realisasi APBD Kota Ternate tahun 2013 adalah sebagai berikut:

- Anggaran Pendapatan terealisasi sebesar 99,77 %
- Anggaran Belanja terealisasi sebesar 94,75 %

BAB IV

P E N U T U P

Kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 sesuai evaluasi hasil pengukuran dengan menggunakan skala ordinal, diketahui bahwa kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 berada pada katagori **Sangat Berhasil**. Hal tersebut terlihat dari hasil pengukuran penetapan kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013, sebanyak 11 sasaran semuanya mencapai hasil optimal $\geq 85\%$. Rata-rata capaian kinerja indikator sasaran tahun 2013 sebesar 123,61%, kinerja pencapaian indikator sasaran tahun 2012 sebesar 99,25%, dengan demikian terjadi peningkatan kinerja pencapaian indikator sasaran tahun 2013 sebesar 24,36 %. Jumlah indikator kinerja sasaran tahun 2013 sebanyak 91 indikator, 80 (87,91%) indikator kinerja sasaran mencapai hasil optimal ($\geq 85\%$), dan hanya 11 (12,09%) indikator kinerja sasaran Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 yang nilai capaiannya kurang optimal ($< 85\%$). Capaian indikator sasaran yang kurang/tidak optimal tersebut, yaitu:

1. Angka kesembuhan penderita TB paru dan BTA, nilai capaian 62,82%. Rendahnya nilai capaian disebabkan adanya kasus di RS Chasan Boesorie yang tidak dilakukan pemeriksaan dahak di akhir pengobatan dan angka kematian masih tinggi dikarenakan adanya penyakit penyerta seperti Diabetes Melitus, Jantung, dll.
2. Persentase gizi buruk pada balita nilai capaian 57,14%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan masih tingginya kasus gizi buruk pada balita yang ditemukan. Pada tahun 2013 prevalensi gizi buruk 0,7%, yaitu dari 8.848 anak yang ditangani, ditemukan 60 kasus gizi buruk yang ditemukan. Tingginya kasus gizi buruk tersebut disebabkan:
 - a. Kegiatan Promotif belum berjalan dengan maksimal (pemantauan pertumbuhan, konseling ASI /MP-ASI).
 - b. Adanya penyakit penyerta (TB, Pnemonia, Malaria).
 - c. Faktor Ekonomi (masi kurangnya ketersediaan pangan dalam keluarga).
3. Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk, nilai capaian 59,09%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan jumlah dokter gigi yang melayani kesehatan gigi di

- Kota Ternate jumlahnya masih minim. Jumlah dokter gigi yang ada di Kota Ternate hanya berjumlah 13 orang, kondisi ideal seharusnya 22 orang dokter.
4. Rasio bidan per 100.000 penduduk, nilai capaian 84,64%. Rendahnya nilai capaiannya tersebut disebabkan jumlah bidan yang berada di Kota Ternate hanya sebanyak 237 orang kondisi ideal sesuai SPM seharusnya 280 orang sehingga masih kekurangan sebanyak 43 orang.
 5. Persentase kecamatan bebas rawan gizi, nilai capain 83,00%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gizi untuk meningkatkan derajat kesehatan dan juga faktor ekonomi, yaitu kurang tersedianya pangan yang cukup untuk kebutuhan keluarga.
 6. Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu, nilai capaian 0,00%, hal tersebut disebabkan pada tahun anggaran 2013 ketersediaan dana untuk melaksanakan program Pemerintah Kota Ternate tahun 2013 sangat terbatas/defisit sehingga program pemberian bantuan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
 7. Persentase PNS yang diberikan sanksi nilai capaian 59.22%, hal tersebut disebabkan adanya komitmen yang kuat dari Walikota Ternate untuk menegakan disiplin dengan memberikan sanksi kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan PP 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga pada tahun 2013 terdapat 103 PNS yang diberi sanksi.
 8. Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan, nilai capaian 82,35%. Rendahnya nilai capaian disebabkan rendahnya alokasi anggaran sehingga sesuai target sebanyak 34 kelompok yang dapat diberikan bantuan hanya sebanyak 28 kelompok.
 9. Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan, nilai capaian 50,00%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan rendahnya alokasi anggaran yang diperuntukkan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan kontribusi pada pencapaian target indikator sasaran tersebut.
 10. Tingkat Inflasi, nilai capaian 56,03%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan adanya peralihan musim yang menyebabkan naiknya tinggi gelombang diperairan Maluku Utara yang mempengaruhi laju distribusi serta kapasitas produksi sektor

perikanan dan juga faktor komoditas yang berasal dari kelompok komoditas bergejolak (*volatile foods*) yang merupakan komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak kerana faktor-faktor tertentu.

11. Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan, nilai capaian 78,95%. Rendahnya nilai capaian tersebut disebabkan minimnya alokasi anggaran yang diperuntukan untuk melaksanakan kegiatan yang memberikan kontribusi pada pencapaian target indikator sasaran tersebut.

Kelemahan tersebut di atas, diprioritaskan untuk segera dibenahi dengan memperhatikan faktor-faktor penyebabnya. Dengan memperhatikan keberhasilan yang telah dicapai maupun kekurangan/kelemahan sebagaimana tergambar dalam akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Ternate tahun 2013, maka hal tersebut akan dijadikan umpan balik untuk lebih meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Kota Ternate kedepan guna peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat dengan mengedepankan prinsip-prinsip *Good Governance*.

**LAMPIRAN
RENCANA KINERJA TAHUNAN**

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Pemerintah : **Kota Ternate**
Tahun : **2013**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan | 1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan | 60.00 % |
| | 2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih | 85.00 % |
| | 3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN | 65.00 % |
| 2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik | 1 Indeks Pembangunan Manusia | 77.92 % |
| | 2 Angka melek huruf seluruh penduduk | 100 % |
| | 3 Angka melek huruf pada usia dewasa | 100 % |
| | 4 Nilai UN dan UAS rata-rata | |
| | - Nilai UN rata-rata SD | 6.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata SD | 6.00 |
| | - Nilai UN rata-rata SLTP | 5.50 |
| | - Nilai UAS rata-rata SLTP | 6.00 |
| | - Nilai UN rata-rata SLTA | 5.50 |
| | - Nilai UAS rata-rata SLTA | 6.00 |
| | - Nilai UN rata-rata paket A | 6.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata paket A | 6.00 |
| | - Nilai UN rata-rata paket B | 6.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata paket B | 6.50 |
| | - Nilai UN rata-rata paket C | 6.00 |
| - Nilai UAS rata-rata paket C | 6.50 | |
| 5 Angka kelulusan | | |
| - SD | 100 % | |
| - SLTP | 100 % | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-------------------|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| | - SLTA | 100 % |
| | 6 Angka putus sekolah | |
| | - SD | 0,16 % |
| | - SLTP | 0,16 % |
| | - SLTA | 0,17 % |
| | 7 Angka rata-rata lama sekolah | |
| | - SD | 6 Tahun |
| | - SLTP | 3 Tahun |
| | - SLTA | 3 Tahun |
| | 8 Angka partisipasi murni | |
| | - SD | 90,50 % |
| | - SLTP | 95,50 % |
| | - SLTA | 90,50 % |
| | 9 Angka partisipasi kasar | |
| | - SD | 100,50 % |
| | - SLTP | 90,50 % |
| | - SLTA | 90,00 % |
| | 10 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah | |
| | - SD | 1 : 164 % |
| | - SLTP | 1 : 289 % |
| | - SLTA | 1 : 367 % |
| | 11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD | 1 : 32 |
| | 12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP | 1 : 32 |
| | 13 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA | 1 : 32 |
| | 14 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD | 1 : 20 |
| | 15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP | 1 : 20 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|---|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 16 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA | 1 : 20 |
| | 1 Angka usia harapan hidup | 71 Tahun |
| | 2 Angka prevalensi penyakit | |
| | - Malaria | 20/1.000 Pddk |
| | - TBC | 224/100.000 Pddk |
| | - DBD | 3.8 % |
| | - HIV | 0,89/1.000 Pddk |
| | 3 Angka kematian kasar (per 1000 penduduk) | |
| | - Karena penyakit Malaria | < 2 % |
| | - Karena penyakit TBC | < 2 % |
| | - Karena penyakit DBD | < 2 % |
| | - Karena penyakit HIV | < 15 % |
| | 4 Angka kesembuhan penderita TB | 85.00 % |
| | 5 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | 24/1.000 KH |
| | 6 Angka kematian balita | 32/1.000 KH |
| | 7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | 118/100.000 KH |
| 8 Persentase balita gizi buruk | < 0,4 % | |
| 9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk | 6 : 100.000 Pddk | |
| 10 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk | 11 : 100.000 Pddk | |
| 11 Rasio bidan per 100.000 penduduk | 140 : 100.000 Pddk | |
| 12 Rasio perawat per 100.000 penduduk | 100 : 100.000 Pddk | |
| 13 Rasio Posyandu terhadap balita | 1 : 60 Balita | |
| 14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 1 : 20.000 Pddk | |
| 15 Rasio Pustu per satuan penduduk | 1 : 14.000 Pddk | |
| 16 Persentase kecamatan bebas rawan gizi | 100 % | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) |
| 4 Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat | 17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam | 100 % |
| | 18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan | 100 % |
| | 19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan | 90.00 % |
| | 20 Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk | |
| | - <i>Annual Malaria Incidence</i> (AMI) | 20.00 ‰ |
| | - <i>Annual Parasite Incidence</i> (API) | 1.00 ‰ |
| | 1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja | 60.00 % |
| | 2 Rasio belanja modal terhadap total belanja | 30.00 % |
| | 3 Persentase peningkatan dana partisipatif kecamatan | 7.3 % |
| | 4 Persentase peningkatan dana <i>cost sharing</i> PNPM MP | 6.8 % |
| | 5 Persentase kelurahan yang memiliki satu program unggulan <i>One Village One Program</i> | 25.00 % |
| | 6 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan | |
| | - MCK Komunal | 20.00 % |
| | - Drainase /gorong-gorong | 5.00 % |
| - Jalan lingkungan | 2.00 % | |
| 7 Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu | 100.00 % | |
| 8 Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda | 30.00 % | |
| 9 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah | 40 KK | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|-----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 5 Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu | 1 Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata | 6 lokasi |
| | 2 Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan | 50.00 % |
| | 3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan | 60.00 % |
| | 4 Persentase kecamatan bebas sampah dan banjir | 42.86 % |
| 6 Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat | 1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan | 6.79 % |
| | 2 Persentase PNS yang diberikan sanksi | 0.51 % |
| | 3 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan | |
| | - Eselon III | 15.00 % |
| | - Eselon IV | 20.00 % |
| | 4 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | 80.00 % |
| | 5 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100.00 % |
| 6 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK | 35.00 % | |
| 7 Rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian | 1 hari | |
| 7 Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional. | 1 Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha | 100 Kop. |
| | 2 Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha | 5 Klp. |
| | 3 Nilai modal kerja dan investasi UKM | 803,245,757,842.00 Rp |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | |
|---|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | |
| | 4 Nilai omzet UKM | 1,296,237,312,997 Rp | |
| | 5 Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh modal usaha | 15 Klp. | |
| | 6 Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan | 15 Klp. | |
| | 7 Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan | 120 Klp. | |
| | 8 Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan | 15 Klp. | |
| | 9 Tingkat pengangguran terbuka | 8.0 % | |
| | 10 Pendapatan perkapita | 3,284,325 Rp | |
| | 11 Laju pertumbuhan ekonomi | 8.50 % | |
| | 12 Tingkat Inflasi | 4.00 % | |
| | 8 Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas | 1 Jumlah SOP pelayanan publik | 5 SOP |
| | | 2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya | 8 jenis |
| | | 3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai | 10 tempat |
| 4 Rasio jumlah penduduk ber-KTP | | 0,9 : 1 | |
| 5 Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran | | 70.00 % | |
| 6 Persentase ketersediaan armada sampah (dumptruck) | | 50.00 % | |
| 9 Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir | 1 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan | 50 Klp. | |
| | 2 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan | 100 Klp. | |
| | 3 Jumlah regulasi terkait pemberdayaan masyarakat pesisir | 3 Buah | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|----------|
| (1) | (2) | (3) |
| 10 Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya | 1 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran | 100.00 % |
| | 2 Jumlah Taman Pengajian Al-Quran aktif | 100 TPQ |
| | 3 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama | 4 Kali |
| | 4 Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan | 30 orang |
| | 5 Jumlah regulasi terkait permasalahan penyakit sosial masyarakat | 3 buah |
| | 6 Menurunnya pertumbuhan PMKS | 1.50 % |
| | 7 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate | 100 % |
| | 8 Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran budaya Ternate | 12.00 % |
| | 9 Persentase situs budaya yang dilestarikan | 37.93 % |
| 11 Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah | 1 Jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan | 4 buah |
| | 2 Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan | 100 % |
| | 3 Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani | 15 kasus |

**L A M P I R A N
P E N E T A P A N K I N E R J A**

PENETAPAN KINERJA

Pemerintah : **Kota Ternate**
Tahun : **2013**

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1 Terwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan | 1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan | 50.00 % |
| | 2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang terlayani air bersih | 80.95 % |
| | 3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN | 62.50 % |
| 2 Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik | 1 Indeks Pembangunan Manusia | 77.92 % |
| | 2 Angka melek huruf seluruh penduduk | 100 % |
| | 3 Angka melek huruf pada usia dewasa | 100 % |
| | 4 Nilai UN dan UAS rata-rata | |
| | - Nilai UN rata-rata SD | 6.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata SD | 6.00 |
| | - Nilai UN rata-rata SLTP | 5.50 |
| | - Nilai UAS rata-rata SLTP | 6.00 |
| | - Nilai UN rata-rata SLTA | 5.50 |
| | - Nilai UAS rata-rata SLTA | 6.00 |
| | - Nilai UN rata-rata paket A | 6.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata paket A | 6.00 |
| | - Nilai UN rata-rata paket B | 6.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata paket B | 6.50 |
| | - Nilai UN rata-rata paket C | 6.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata paket C | 6.50 |
| | 5 Angka kelulusan | |
| - SD | 100 % | |
| - SLTP | 100 % | |
| - SLTA | 100 % | |
| 6 Angka putus sekolah | | |
| - SD | 0.16 % | |
| - SLTP | 0.16 % | |
| - SLTA | 0.17 % | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|--|------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | 7 Angka rata-rata lama sekolah | |
| | - SD | 6 Tahun |
| | - SLTP | 3 Tahun |
| | - SLTA | 3 Tahun |
| | 8 Angka partisipasi murni | |
| | - SD | 90.50 % |
| | - SLTP | 95.50 % |
| | - SLTA | 90.50 % |
| | 9 Angka partisipasi kasar | |
| | - SD | 100.50 % |
| | - SLTP | 90.50 % |
| | - SLTA | 90.00 % |
| | 10 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah | |
| | - SD | 1 : 164 % |
| | - SLTP | 1 : 289 % |
| | - SLTA | 1 : 367 % |
| 11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD | 1 : 32 | |
| 12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP | 1 : 32 | |
| 13 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA | 1 : 32 | |
| 14 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD | 1 : 20 | |
| 15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP | 1 : 20 | |
| 16 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA | 1 : 20 | |
| 3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1 Angka usia harapan hidup | 71 Tahun |
| | 2 Angka prevalensi penyakit | |
| | - Malaria | 20/1.000 Pddk |
| | - TBC | 224/100.000 Pddk |
| | - DBD | 3.8 % |
| | - HIV | 0,89/1.000 Pddk |
| | 3 Angka kematian kasar (per 1000 penduduk) | |
| - Karena penyakit Malaria | < 2 % | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|--------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| | - Karena penyakit TBC | < 2 % |
| | - Karena penyakit DBD | < 2 % |
| | - Karena penyakit HIV | < 15 % |
| | 4 Angka kesembuhan penderita TB par | 85.00 % |
| | 5 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | 24/1.000 KH |
| | 6 Angka kematian balita | 32/1.000 KH |
| | 7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | 118/100.000 KH |
| | 8 Persentase balita gizi buruk | < 0,4 % |
| | 9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk | 6 : 100.000 Pddk |
| | 10 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk | 11 : 100.000 Pddk |
| | 11 Rasio bidan per 100.000 penduduk | 140 : 100.000 Pddk |
| | 12 Rasio perawat per 100.000 penduduk | 100 : 100.000 Pddk |
| | 13 Rasio Posyandu terhadap balita | 1 : 60 Balita |
| | 14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 1 : 20.000 Pddk |
| | 15 Rasio Pustu per satuan penduduk | 1 : 14.000 Pddk |
| | 16 Persentase kecamatan bebas rawan gizi | 100 % |
| | 17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam | 100 % |
| | 18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan | 100 % |
| | 19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan | 90.00 % |
| | 20 Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk | |
| | - <i>Annual Malaria Incidence</i> (AMI) | 20.00 ‰ |
| | - <i>Annual Parasite Incidence</i> (API) | 1.00 ‰ |
| 4 Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat | 1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja | 49.06 % |
| | 2 Rasio belanja modal terhadap total belanja | 21.45 % |
| | 3 Persentase peningkatan dana partisipatif kecamatan | 7.3 % |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|--|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) |
| | 4 Persentase peningkatan dana <i>cost sharing</i> PNPM MP | 6.8 % |
| | 5 Persentase kelurahan yang memiliki satu program unggulan <i>One Village One Program</i> | 30.00 % |
| | 6 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan | |
| | - MCK Komunal | 12.90 % |
| | - Drainase /gorong-gorong | 4.68 % |
| | - Jalan lingkungan | 7.13 % |
| | 7 Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu | 90.00 % |
| | 8 Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda | 29.41 % |
| | 9 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah | 30 KK |
| 5 Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu | 1 Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata | 12 lokasi |
| | 2 Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan | 70.00 % |
| | 3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan | 55.83 % |
| | 4 Persentase kecamatan bebas sampah dan banjir | 3.70 % |
| 6 Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat | 1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan | 6.19 % |
| | 2 Persentase PNS yang diberikan sanksi | 1.03 % |
| | 3 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan | |
| | - Eselon III | 20.00 % |
| | - Eselon IV | 30.00 % |
| | 4 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | 90.00 % |
| | 5 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100.00 % |
| 6 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK | 35.00 % | |
| 7 Rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian | 2 hari | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|---|--|----------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 7 Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional. | 1 Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha | 10 Kop. |
| | 2 Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha | 26 Klp. |
| | 3 Nilai modal kerja dan investasi UKM | 1,328,846,832.44 Rp |
| | 4 Nilai omzet UKM | 1,395,892,295,056 Rp |
| | 5 Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh modal usaha | 10 Klp. |
| | 6 Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan | 5 Klp. |
| | 7 Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan | 34 Klp. |
| | 8 Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan | 4 Klp. |
| | 9 Tingkat pengangguran terbuka | 6.7 % |
| | 10 Pendapatan perkapita | 3,005,770 Rp |
| | 11 Laju pertumbuhan ekonomi | 8.26 % |
| | 12 Tingkat Inflasi | 4.30 % |
| 8 Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas | 1 Jumlah SOP pelayanan publik | 5 SOP |
| | 2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya | 8 jenis |
| | 3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai | 10 tempat |
| | 4 Rasio jumlah penduduk ber-KTP | 0,8 : 1 |
| | 5 Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran | 50.00 % |
| | 6 Persentase ketersediaan armada sampah (dumptruck) | 76.00 % |
| 9 Meningkatnya kemandirian masyarakat pesisir | 1 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan | 38 Klp. |
| | 2 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan | 100 Klp. |

| Strategi | Indikator Kinerja | Tipe |
|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) |
| 10 Tertanganinya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagaman, permasalahan sosial, dan budaya | 1 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran 2 Jumlah Taman Pengajian Al-Quran 3 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama 4 Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan 5 Jumlah regulasi terkait permasalahan penyakit sosial masyarakat 6 Menurunnya pertumbuhan PMKS 7 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate 8 Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran budaya Ternate 9 Persentase situs budaya yang dilestarikan | 100.00 % 100 TPQ 4 Kali 30 orang 2 buah 2.51 % 100 % 12.00 % 37.93 % |
| 11 Tertanganinya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah | 1 Jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan 2 Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan 3 Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani | 8 buah 100 % 15 kasus |

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2013 148,060,916,135.00

TERNATE, 25 FEBRUARI 2013
 WALIKOTA TERNATE

 BURHAN ABDURAHMAN S.H., M.M.

**L A M P I R A N
P E N G U K U R A N K I N E R J A**

PENGUKURAN KINERJA

Pemerintah : Kota Ternate
Tahun : 2013

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|---|----------|-----------|--------|
| 1 Tenwujudnya pemerataan infrastruktur di wilayah kecamatan di luar kawasan perkotaan secara berkeadilan | 1 Persentase panjang jalan dalam kondisi baik di wilayah kecamatan di luar perkotaan | 50.00 % | 51.04 % | 102.09 |
| | 2 Persentase kelurahan pada kawasan dataran tinggi yang tertayani air bersih | 80.95 % | 80.95 % | 100.00 |
| | 3 Persentase kelurahan di wilayah kecamatan di luar perkotaan yang terjangkau layanan listrik PLN | 62.50 % | 62.50 % | 100.00 |
| 2 Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat dengan perluasan akses pendidikan yang murah dan terjangkau sarana dan fasilitas yang memadai, tenaga guru yang cukup dan mutu yang terus membaik | 1 Indeks Pembangunan Manusia | 77.92 % | 77.62 % | 99.61 |
| | 2 Angka melek huruf seluruh penduduk | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 |
| | 3 Angka melek huruf pada usia dewasa | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 |
| | 4 Nilai UN dan UAS rata-rata | | | |
| | - Nilai UN rata-rata SD | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata SD | 6.00 | 8.00 | 133.33 |
| | - Nilai UN rata-rata SLTP | 5.50 | 5.50 | 100.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata SLTP | 6.00 | 8.00 | 133.33 |
| | - Nilai UN rata-rata SLTA | 5.50 | 5.50 | 100.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata SLTA | 6.00 | 8.00 | 133.33 |
| | - Nilai UN rata-rata paket A | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| | - Nilai UAS rata-rata paket A | 6.00 | 8.00 | 133.33 |
| | - Nilai UN rata-rata paket B | 6.00 | 6.00 | 100.00 |
| - Nilai UAS rata-rata paket B | 6.50 | 8.00 | 123.08 | |
| - Nilai UN rata-rata paket C | 6.00 | 6.00 | 100.00 | |
| - Nilai UAS rata-rata paket C | 6.50 | 8.00 | 123.08 | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-------------------|---|-----------|-----------|--------|
| 5 | Angka kelulusan | | | |
| | - SD | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 |
| | - SLTP | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 |
| 6 | Angka putus sekolah | | | |
| | - SD | 0.16 % | 0.12 % | 125.00 |
| | - SLTP | 0.16 % | 0.18 % | 87.50 |
| 7 | Angka rata-rata lama sekolah | | | |
| | - SD | 0.17 % | 0.21 % | 76.47 |
| | - SLTP | | | |
| 8 | Angka partisipasi murni | | | |
| | - SD | 6 Tahun | 6 Tahun | 100.00 |
| | - SLTP | 3 Tahun | 3 Tahun | 100.00 |
| 9 | Angka partisipasi kasar | | | |
| | - SD | 3 Tahun | 3 Tahun | 100.00 |
| | - SLTP | | | |
| 10 | Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah | | | |
| | - SD | 90.50 % | 97.31 % | 107.52 |
| | - SLTP | 95.50 % | 86.91 % | 91.01 |
| 11 | | | | |
| | - SD | 90.50 % | 82.73 % | 91.41 |
| | - SLTP | | | |
| 12 | | | | |
| | - SD | 100.50 % | 105.79 % | 105.26 |
| | - SLTP | 90.50 % | 99.79 % | 110.27 |
| 13 | | | | |
| | - SD | 90.00 % | 94.73 % | 105.26 |
| | - SLTP | | | |
| 14 | | | | |
| | - SD | 1 : 164 % | 1 : 184 % | 108.93 |
| | - SLTP | 1 : 289 % | 1 : 340 % | 114.61 |
| 15 | | | | |
| | - SD | 1 : 367 % | 1 : 444 % | 118.03 |
| | - SLTP | | | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--|----------------------|----------------------|--------|
| 3 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 11 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SD | 1 : 32 | 1 : 32 | 100.00 |
| | 12 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTP | 1 : 32 | 1 : 32 | 100.00 |
| | 13 Rasio jumlah RKB terhadap murid pada tingkat SLTA | 1 : 32 | 1 : 32 | 100.00 |
| | 14 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SD | 1 : 20 | 1 : 16 | 95.00 |
| | 15 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTP | 1 : 20 | 1 : 18 | 97.50 |
| | 16 Rasio guru terhadap murid pada tingkat SLTA | 1 : 20 | 1 : 18 | 97.50 |
| | 1 Angka usia harapan hidup | 71 Tahun | 68.7 Tahun | 96.76 |
| | 2 Angka prevalensi penyakit | | | |
| | - Malaria | 20/1000 Pddk | 16/1000 Pddk | 120.00 |
| | - TBC | 224/100.000 Pddk | 215/100.000 Pddk | 104.02 |
| | - DBD | 3.80 % | 3.40 % | 89.47 |
| | - HIV | 0.89/1.000 Pddk | 0.2/1.000 Pddk | 177.53 |
| | 3 Angka kematian kasar (per 1.000 penduduk) | | | |
| | - Karena penyakit Malaria | < 2 per 100.000 Pddk | < 4 per 100.000 Pddk | 50.00 |
| | - Karena penyakit TBC | < 2 per 100.000 Pddk | < 3 per 100.000 Pddk | 66.67 |
| | - Karena penyakit DBD | < 2 per 100.000 Pddk | < 1 per 100.000 Pddk | 200.00 |
| - Karena penyakit HIV | <15 per 100.000 Pddk | < 3 per 100.000 Pddk | 500.00 | |
| 4 Angka kesembuhan penderita TB paru BTA | 85.00 % | 89.00 % | 104.71 | |
| 5 Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup | 24/1.000 KH | 5/1.000 KH | 480.00 | |
| 6 Angka kematian balita | 32/1.000 | 2/1.000 | 1.600.00 | |
| 7 Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup | 118/100.000 KH | 98/100.000 KH | 120.41 | |
| 8 Persentase balita gizi buruk | < 0,4 % | 0.7 % | 57.14 | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % | |
|--|---|-------------------|---------------------|--------|--|
| 4 Terwujudnya kebijakan Anggaran (APBD) yang proporsional dan Pro Rakyat | 9 Rasio dokter spesialis per 100.000 penduduk | 6:100000 Pddk | 16:100000 Pddk | 266.67 | |
| | 10 Rasio dokter gigi per 100.000 penduduk | 11 : 100000 Pddk | 6.5 : 100000 Pddk | 59.09 | |
| | 11 Rasio bidan per 100.000 penduduk | 140 : 100000 Pddk | 118.5 : 100000 Pddk | 84.64 | |
| | 12 Rasio perawat per 100.000 penduduk | 100 : 100000 Pddk | 230 : 100000 Pddk | 230.00 | |
| | 13 Rasio Posyandu terhadap balita | 1 : 60 Balita | 1 : 76 Balita | 88.24 | |
| | 14 Rasio Puskesmas per satuan penduduk | 1 : 20.000 Pddk | 1 : 21.590 Pddk | 98.05 | |
| | 15 Rasio Pustu per satuan penduduk | 1 : 14.000 Pddk | 1 : 15.422 Pddk | 98.11 | |
| | 16 Persentase kecamatan bebas rawan gizi | 100.00 % | 83.00 % | 83.00 | |
| | 17 Persentase kelurahan terkena KLB yang ditangani < 24 jam | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 | |
| | 18 Persentase keluarga miskin yang mendapat pelayanan kesehatan | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 | |
| | 19 Persentase persalinan oleh tenaga kesehatan | 90.00 % | 91.38 % | 101.53 | |
| | 20 Rasio penderita malaria terhadap jumlah penduduk | | | | |
| | - <i>Annual Malaria Incidence (AMI)</i> | 20.00 ‰ | 16.00 ‰ | 125.00 | |
| | - <i>Annual Parasite Incidence (API)</i> | 1.00 ‰ | 1.00 ‰ | 100.00 | |
| | 1 Rasio belanja langsung terhadap total belanja | 49.06 % | 47.10 % | 96.01 | |
| | 2 Rasio belanja modal terhadap total belanja | 21.45 % | 19.27 % | 89.82 | |
| | 3 Persentase peningkatan dana partisipatif kecamatan | 7.30 % | 34.99 | 479.26 | |
| | 4 Persentase peningkatan dana <i>cost sharing</i> PNPM MP | 6.80 % | 62.64 | 921.14 | |
| | 5 Persentase kelurahan yang memiliki satu program unggulan <i>One Village One Program</i> | 30.00 % | 75.00 % | 250.00 | |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|--|---|-----------|------------|--------|
| 5 Tertatanya infrastruktur perkotaan sebagai kota jasa dan perdagangan dengan pemanfaatan ruang kota secara terpadu | 6 Persentase peningkatan infrastruktur lingkungan | | | |
| | - MCK Komunal | 12.90 % | 14.29 % | 110.74 |
| | - Drainase /gorong-gorong | 4.68 % | 4.41 % | 94.13 |
| | - Jalan lingkungan | 7.13 % | 15.33 % | 215.05 |
| | 7 Persentase pemberian santunan kematian bagi warga kurang mampu | 90.00 % | - | - |
| | 8 Persentase pemberian bantuan pembinaan bagi generasi muda | 29.41 % | 58.14 % | 197.67 |
| | 9 Jumlah masyarakat miskin yang mendapat bantuan sertifikat tanah | 30 KK | 30 KK | 100.00 |
| | 1 Jumlah lokasi di kawasan pasar gamalama dan tapak yang ditata | 12 lokasi | 11 lokasi | 91.67 |
| | 2 Persentase taman kota di kawasan perkotaan yang difungsikan | 70.00 % | 62.50 % | 89.29 |
| 6 Terwujudnya <i>good government</i> , dengan sumber daya aparatur yang profesional, kreatif, inovatif, yang mampu menjamin peningkatan kualitas pelayanan, akuntabilitas dan kemandirian masyarakat | 3 Rasio ruang terbuka hijau (RTH) di kawasan perkotaan | 55.83 % | 60.91 % | 109.10 |
| | 4 Persentase kecamatan bebas sampah dan banjir | 42.86 % | 42.86 Kec. | 100.00 |
| | 1 Persentase PNS yang memperoleh penghargaan | 6.19 % | 6.80 % | 109.86 |
| | 2 Persentase PNS yang diberikan sanksi | 1.03 % | 1.75 % | 59.22 |
| 3 Persentase pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan | - Eselon III | 20.00 % | 42.86 % | 214.29 |
| | - Eselon IV | 30.00 % | 24.23 % | 80.76 |
| | 4 Persentase pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | 90.00 % | 98.43 % | 109.37 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|---|--------------------------------|-------------------------|--------|
| 7 Meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pekebun, peternak, buruh dan pekerja, koperasi, usaha mikro kecil menengah (UMKM), pedagang kaki lima dan pedagang tradisional. | 5 Persentase kenaikan pangkat PNS tepat waktu | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 |
| | 6 Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK | 35.00 % | 59.71 | 170.59 |
| | 7 Rata-rata penyelesaian berkas kepegawaian | 2 hari | 2 hari | 100.00 |
| | 1 Jumlah koperasi aktif yang diberikan bantuan modal usaha | 10 Kop. | 13 Kop. | 130.00 |
| | 2 Jumlah kelompok perempuan dan pemuda yang diberikan modal usaha | 26 Klp. | 27 Klp. | 103.85 |
| | 3 Nilai modal kerja dan investasi UKM | 785,529,587,031.00 Rp | 748,123,416,220.00 Rp | 95.24 |
| | 4 Nilai omzet UKM | 1,395,892,295,056 Rp | 1,388,947,557,270.00 Rp | 99.50 |
| | 5 Jumlah PKL dan pedagang tradisional yang memperoleh modal usaha | 10 Klp. | 14 Klp. | 140.00 |
| | 6 Jumlah kelompok tani yang memperoleh bantuan | 5 Klp. | 5 Klp. | 100.00 |
| | 7 Jumlah kelompok nelayan tangkap yang memperoleh bantuan | 34 Klp. | 28 Klp. | 82.35 |
| | 8 Jumlah kelompok nelayan budidaya yang memperoleh bantuan | 4 Klp. | 2 Klp. | 50.00 |
| | 8 Terwujudnya pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, nyaman dan berkualitas | 9 Tingkat pengangguran terbuka | 6.70 % | 4.85 % |
| 10 Pendapatan perkapita | | 3,005,770 Rp | 3,250,601 Rp | 108.15 |
| 11 Laju pertumbuhan ekonomi | | 8.26 % | 8.23 % | 99.64 |
| 12 Tingkat Inflasi | | 4.30 % | 9.78 % | 56.03 |
| 1 Jumlah SOP pelayanan publik | | 5 SOP | 6 SOP | 120.00 |
| 2 Jumlah layanan perizinan bebas biaya | | 8 jenis | 8 Jenis | 100.00 |
| 3 Jumlah tempat pelayanan publik yang telah difasilitasi dengan sarana memadai | | 10 tempat | 10 Tempat | 100.00 |
| 4 Rasio jumlah penduduk ber-KTP | | 0.8:1 | 0.7:1 | 87.50 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|---|--|----------|-----------|--------|
| | 5 Persentase ketersediaan mobil pemadam kebakaran | 50.00 % | 50.00 % | 100.00 |
| | 6 Persentase ketersediaan armada sampah (dumpruck) | 76.00 % | 76.00 % | 100.00 |
| 9 Meningkatkan kemandirian masyarakat pesisir | 1 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang diberikan bantuan | 38 Klp. | 30 Klp. | 78.95 |
| | 2 Jumlah kelompok masyarakat kawasan pesisir yang telah mengolah hasil perikanan | 100 Klp. | 111 Klp. | 111.00 |
| 10 Tertangannya permasalahan menurunnya kesadaran spiritualitas keberagamaan, permasalahan sosial, dan budaya | 1 Persentase siswa SD kelas VI beragama Islam dapat baca tulis Al-Quran | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 |
| | 2 Jumlah Taman Pengajian Al-Quran yang dibina | 100 TPQ | 100 TPQ | 100.00 |
| | 3 Jumlah pertemuan forum antar umat beragama | 4 Kali | 4 Kali | 100.00 |
| | 4 Rata-rata jumlah PSK yang terjaring dan diberikan pembinaan | 30 orang | 46 Orang | 153.33 |
| | 5 Jumlah regulasi terkait permasalahan penyakit sosial masyarakat | 2 buah | 2 buah | 100.00 |
| | 6 Menurunnya pertumbuhan PMKS | 2.51 % | 6.18 % | 246.69 |
| | 7 Persentase sekolah dasar yang telah mengajarkan bahasa daerah Ternate | 100.00 % | 98.17 % | 98.17 |
| | 8 Persentase meningkatnya jumlah peserta pagelaran budaya Ternate | 12.00 % | 12.05 % | 100.40 |
| | 9 Persentase situs budaya yang dilestarikan | 37.93 % | 37.93 % | 100.00 |
| 11 Tertangannya masalah penegakan dan kepastian hukum di daerah | 1 Jumlah Peraturan Daerah baru yang diterbitkan | 8 buah | 8 buah | 100.00 |
| | 2 Persentase permasalahan hukum Pemerintah Kota Ternate yang dapat diselesaikan | 100.00 % | 100.00 % | 100.00 |

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-------------------|---|----------|-----------|-------|
| | 3 Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat ditangani | 15 kasus | 14 kasus | 93,33 |

JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2013 148,060,916,135.00
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 137,489,223,550.00

LAKIP 2013
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PEMERINTAH KOTA TERNATE